



SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA
Sekolah Kader Muhammadiyah dan Bangsa

EKONOMI

Disusun oleh :
Nina Risnawati, S.Pd.
Tri Pradanang, S. Pd.

**SMA MUHAMMADIYAH 1
YOGYAKARTA**



**KELAS
XI
Semester 2**

Untuk Kalangan Sendiri



MODUL EKONOMI

KELAS XI

SEMESTER 2

Disusun Oleh :

Nina Risnawati, S.Pd.

Tri Pradanang, S. Pd.

KATA PENGANTAR

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang sangat dibutuhkan dalam era millennial mengingat keterbatasan dukungan sumberdaya alam terhadap kesejahteraan penduduk dunia yang makin bertambah dan makin kompetitif. Proses belajar ekonomi akan terbentuk dan terasah dengan baik sejak remaja akan dapat menghasilkan sumberdaya manusia inovatif yang mampu membebaskan bangsa dan negaranya dari ketergantungan pada sumberdaya alam. Modul ini membekali peserta didik dengan kemampuan menganalisis ilmu ekonomi yang dimilikinya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Peserta didik diharapkan akan lebih kritis terhadap isu-isu ekonomi nasional maupun internasional sebagai bekal pengetahuan dan kemampuan menganalisis peristiwa ekonomi yang sedang dan akan terjadi. Modul ini mencakup aktivitas dan materi pembelajaran yang secara utuh dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menciptakan karya nyata, menangkap peluang pasar dunia, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan nasional.

Pembelajaran ini dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah peristiwa ekonomi yang terjadi di dunia. Sebagai mata pelajaran wajib bagi seluruh kelas XI, tambahan materi peristiwa yang sedang terjadi di dunia ekonomi nasional maupun internasional yang relevan sangat diharapkan untuk ditambahkan sebagai pengayaan dari modul ini. Modul ini sangat terbuka dan perlu kritik saran untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari sebuah modul ini dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya dalam rangka mempersiapkan generasi kreatif inovatif menuju revolusi industri 4.0 dan mewujudkan Indonesia Emas.

Yogyakarta, Januari 2020

Penulis

KATA PENGANTAR
KEPALA SEKOLAH SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat karunia kepada kita semua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Salah satu bentuk sumber belajar dan bahan ajar adalah buku, modul, ensiklopedia, dan bentuk cetakan lainnya. Modul sebagai salah satu bahan ajar berbentuk cetak sangat baik digunakan dalam pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan modul yang dilakukan oleh guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Dengan pembelajaran daring karena kondisi pandemi covid 19 ini, keberadaan modul diharapkan dapat membantu siswa belajar.

Modul yang disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada kondisi khusus (darurat pandemi covid 19), selain membantu peserta didik dapat belajar secara mandiri dan disusun memuat materi pembelajaran yang jelas dan terperinci, peserta didik juga dapat melakukan evaluasi pembelajaran sehingga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan penguasaan materi dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan sendiri serta dapat digunakan sebagai salah satu rujukan atau referensi untuk materi pelajaran tertentu dan yang berkaitan.

Kpada Bapak/Ibu guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang sudah menyelesaikan penyusunan modul ini kami ucapkan selamat dan terimakasih, semoga modul ini dapat digunakan oleh peserta didik sebagai sumber belajar dan bahan ajar sehingga peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi akademiknya. Semoga Allah SWT meridhloi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Sekolah,

Drs. H. Herynugroho, M.Pd
NIP. 19651221 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	v
BAB 1. APBN DAN APBD	2
KEGIATAN BELAJAR I.....	2
KEGIATAN BELAJAR II.....	11
BAB 2. PERPAJAKAN	23
KEGIATAN BELAJAR I.....	23
KEGIATAN BELAJAR II.....	32
BAB 3. KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL	51
KEGIATAN BELAJAR I.....	51
BAB 4. PERDAGANGAN INTERNASIONAL	64
KEGIATAN BELAJAR I.....	64
KEGIATAN BELAJAR II.....	70
PENUTUP	84
DAFTAR PUSTAKA	85

PENDAHULUAN

A. Diskripsi

Modul Ekonomi Kelas XI semester 2 ini berisikan materi pembelajaran ilmu ekonomi yang diintegrasikan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi. Materi dan tugas yang terdapat pada modul ini disesuaikan dengan kemampuan siswa dan memenuhi standar isi yang sudah ditetapkan. Materi ekonomi Kelas XI meliputi bab APBN dan APBD, perpajakan, kerjasama ekonomi internasional, dan perdagangan internasional serta beberapa penerapan kasus ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini akan menjadi studi kasus yang menarik bagi siswa untuk dijadikan sebagai penilaian ketrampilan maupun untuk mengasah daya kritis siswa terhadap suatu masalah ekonomi. Siswa akan menjalankan proses pembelajaran ditekankan pada masalah ekonomi sesuai tema yang dipilih dengan memanfaatkan keterampilan melihat masalah ekonomi untuk dapat berpikir kreatif, kritis dan mampu menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Modul ini memberikan membimbing siswa untuk melakukan kegiatan secara bertahap, sesuai tahapan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran secara sistematis.

B. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain:

1. Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar dari modul ini.
2. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar..
3. Kerjakan setiap tugas yang diberikan dalam setiap kegiatan belajar dengan penuh semangat dan disiplin.
4. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru.

BAB 1. APBN DAN APBD

APBN

KEGIATAN BELAJAR I

1.1 KD DAN IPK

3.6 Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi.

3.6.1 Menjelaskan pengertian APBN

3.6.2 Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN

3.6.3 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN

3.6.4 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara

3.6.5 Menjelaskan jenis-jenis belanja Negara

3.6.6 Menjelaskan kebijakan anggaran dalam APBN

3.6.6 Menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian

4.6 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi.

4.6.1 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan.

1.2 MATERI

A. Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019.

B. Fungsi dan Tujuan APBN

Sebuah negara yang berdaulat, biasanya suatu negara memiliki 6 buah fungsi APBN yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan antara lain, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi.

1. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk mengalokasikan faktor – faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan kebutuhan umum akan terpenuhi. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian.

2. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah.

3. Fungsi stabilisasi
Fungsi stabilitasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.
4. Fungsi otoritas
Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.
5. Fungsi perencanaan
Fungsi perencanaan APBN bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.
6. Fungsi pengawasan
Fungsi pengawasan APBN, artinya bahwa dengan adanya APBN yang merinci dengan jelas angka – angka yang harus dikeluarkan pada pos tertentu maka pemerintah dapat melakukan pengawasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah antara lain:

1. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.
2. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.
3. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal.
5. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja.

C. Mekanisme Penyusunan APBN

APBN disusun dengan tahapan seperti pada bagan sebagai berikut :



1. Pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis.
2. Pengajuan RAPBN oleh Pemerintah kepada DPR.
3. Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang.
4. Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang, jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya.
5. APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN.

D. Sumber Pendapatan Negara

Sumber APBN secara garis dibagi menjadi dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Negara dibagi menjadi Pendapatan Dalam Negeri dan Penerimaan Hibah.

1. Pendapatan Dalam Negeri

Pendapatan Dalam Negeri artinya penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang termasuk penerimaan dalam negeri yaitu sebagai berikut:

- a. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor.
- b. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

2. Penerimaan Hibah

Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri, hibah yang diterima. Bentuk hibah bisa dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga.

E. Belanja Negara

Belanja negara dibagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. Pengelolaan suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebutuhan belanja atau pengeluaran, namun pengeluaran yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki tujuan : melaksanakan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperlancar roda perekonomian, membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

1. Belanja Pemerintah Pusat

a. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus menerus. Pengeluaran rutin terdiri dari, belanja pegawai, belanja barang dan jasa , belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, bunga cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Adapun yang termasuk pengeluaran rutin lainnya seperti pengeluaran untuk surat menyurat, giro pos, biaya pemilu dan subsidi-subsidi. Penguatan informasi gaji pegawai Negeri sipil (ASN) merupakan salah satu contoh dari belanja pegawai yang pada APBN 2020 mencapai nilai 416 Trilyun rupiah.

- b. Pengeluaran pembangunan
Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor/sub sektor. Pengeluaran pembangunan sifatnya tidak rutin setiap tahun, tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah (pengeluaran pemerintah berupa barang-barang atau uang secara langsung) dan bantuan proyek (pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek).
2. Belanja Pemerintah Daerah
- Belanja pemerintah daerah dialokasikan dalam tranfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah daerah terdiri atas:
- a. Dana perimbangan yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana perimbangan pemerintah daerah meliputi:
 - 1) Dana Bagi Hasil meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah batas arahan pemerintah pusat.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
 - b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang
Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, contoh pengalokasian untuk pembangunan di Provinsi Papua.

F. Kebijakan Anggaran

Pada dasarnya kebijakan anggaran terbagi atas dua macam, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang.

1. Kebijakan Anggaran Berimbang

Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan (dari sektor migas, nonmigas, dan pajak) dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang tahap I/PJP I (1969/1970–1994/1995) menerapkan anggaran berimbang dinamis.

Dinamis berarti bahwa dalam penerimaan lebih mudah dari yang direncanakan semula, pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangannya. Demikian pula dalam hal penerimaan negara melebihi dari yang direncanakan, masih memungkinkan dibentuknya cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup untuk mendukung program yang direncanakan.

2. Kebijakan Anggaran Tidak Berimbang

Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit (deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget). Pada tahun tertentu, pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit dalam anggarannya. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran melebihi penerimaan dari pajak dan migas. Kebijakan anggaran defisit ditempuh jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan

jika perekonomian dalam keadaan resesi. Defisit anggaran bukan hal yang baru dalam kebijakan fiskal suatu negara. Pengoperasian anggaran defisit merupakan alat kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah memengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja suatu perekonomian.

3. Kebijakan Anggaran Dinamis

Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah/negara untuk kemakmuran masyarakat.

4. Kebijakan Anggaran Defisit

Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya.

5. Kebijakan Anggaran Surplus

Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.

G. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

1. Di sini dapat di ketahu besarnya GNP yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
2. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga.
3. Industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi.
4. Bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan.
5. Terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Terbuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

1.3 LATIHAN SOAL

Kerjakan latihan soal berikut!

1. Jelaskan pengertian APBN menurut Anda !
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN memiliki beberapa fungsi. Jelaskan fungsi APBN berikut :
 - a. Fungsi otorisasi
 - b. Fungsi alokasi
 - c. Fungsi stabilisasi
 - d. Fungsi distribusi
 - e. Fungsi pengawasan
 - f. Fungsi perencanaan
3. Menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang – Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab dengan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, maka dalam penetapan setiap tahunnya ada mekanisme cara penyusunannya. Jelaskan mekanisme cara penyusunan APBN dan bagaimana jika APBN yang diajukan di tolak atau tidak disetujui oleh DPR!
4. Penerimaan atau pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang digunakan untuk membiayai belanja negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sebutkan 5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)!
5. Pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan daerah. Jelaskan dana – dana yang di alokasi pemerintah pusat untuk pemerintah daerah tersebut!

1.4 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

Kerjakan soal berikut ini dengan benar!

1. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud APBN adalah
 - a. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPD
 - b. Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Komite Ekonomi Nasional
 - c. Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - e. Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

2. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN mempunyai fungsi, yaitu untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor, seperti dana pensiun, tunjangan guru, dan subsidi. Fungsi ini disebut fungsi
 - a. Distribusi
 - b. Alokasi
 - c. Otorisasi
 - d. Perencanaan
 - e. Stabilitas

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam bentuk tanah, peralatan, bangunan dan mesin disebut
 - a. Belanja barang
 - b. Belanja pegawai
 - c. Belanja modal
 - d. Belanja bunga
 - e. Belanja subsidi

4. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah jika RAPBN yang diajukan tolak oleh DPR adalah...
 - a. Memperbaiki yang tidak mendapat persetujuan
 - b. Menggunakan APBN tahun yang lalu
 - c. Menyusun kembali RAPBN baru
 - d. Tetap menggunakan APBN tersebut
 - e. Menunggu sampai DPR menyetujui

5. Pada APBN terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara sebagai berikut.
 - 1) Hibah
 - 2) Pembayaran bunga utang
 - 3) Pajak pertambahan nilai (PPN)
 - 4) Pajak perdagangan internasional
 - 5) Subsidi BBM

- 6) Bagian pemerintah atas laba BUMN
- 7) Privatisasi BUMN
- 8) Pembiayaan pembangunan

Dari uraian di atas, yang termasuk sumber pendapatan negara ada pada poin

- a. 1), 2), 3), dan 4)
- b. 1), 2), 5), dan 7)
- c. 1), 3), 4), dan 6)
- d. 2), 5), 7), dan 8)
- e. 3), 5), 6), dan 8)

6. Berikut ini jenis-jenis penerimaan negara dalam APBN.

- 1) Cukai
- 2) Pertambangan umum
- 3) Pajak penghasilan nonmigas
- 4) Kehutanan dan perikanan
- 5) BPHTB
- 6) Bagian laba BUMN

Penerimaan negara bukan pajak terurai pada..

- a. 1), 2), dan 3)
- b. 2), 3), dan 4)
- c. 2), 3), dan 5)
- d. 2), 4), dan 6)
- e. 4), 5), dan 6)

7. Fungsi perencanaan APBN diantaranya . . .

- a. Bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
- b. Bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
- c. Bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara
- d. Bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi tidak efisien dan tidak efektifnya
- e. Bahwa penerimaan dan pengeluaran negara diarahkan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

8. Berikut ini pernyataan tentang APBD dan APBN.

- 1) APBN dirancang oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR.
- 2) Tahun anggaran APBD dan APBN mulai bulan Maret dan berakhir pada bulan April.
- 3) APBD disusun oleh pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD.
- 4) Jika RAPBN tidak disetujui oleh DPR, maka yang dipergunakan APBN tahun sebelumnya.
- 5) Retribusi merupakan sumber pendapatan dalam APBN.

Pernyataan di atas yang benar tentang APBN ada pada poin

- a. 1), dan 3)
- b. 1), dan 4)
- c. 2), dan 3)
- d. 3), dan 5)
- e. 4) dan 5)

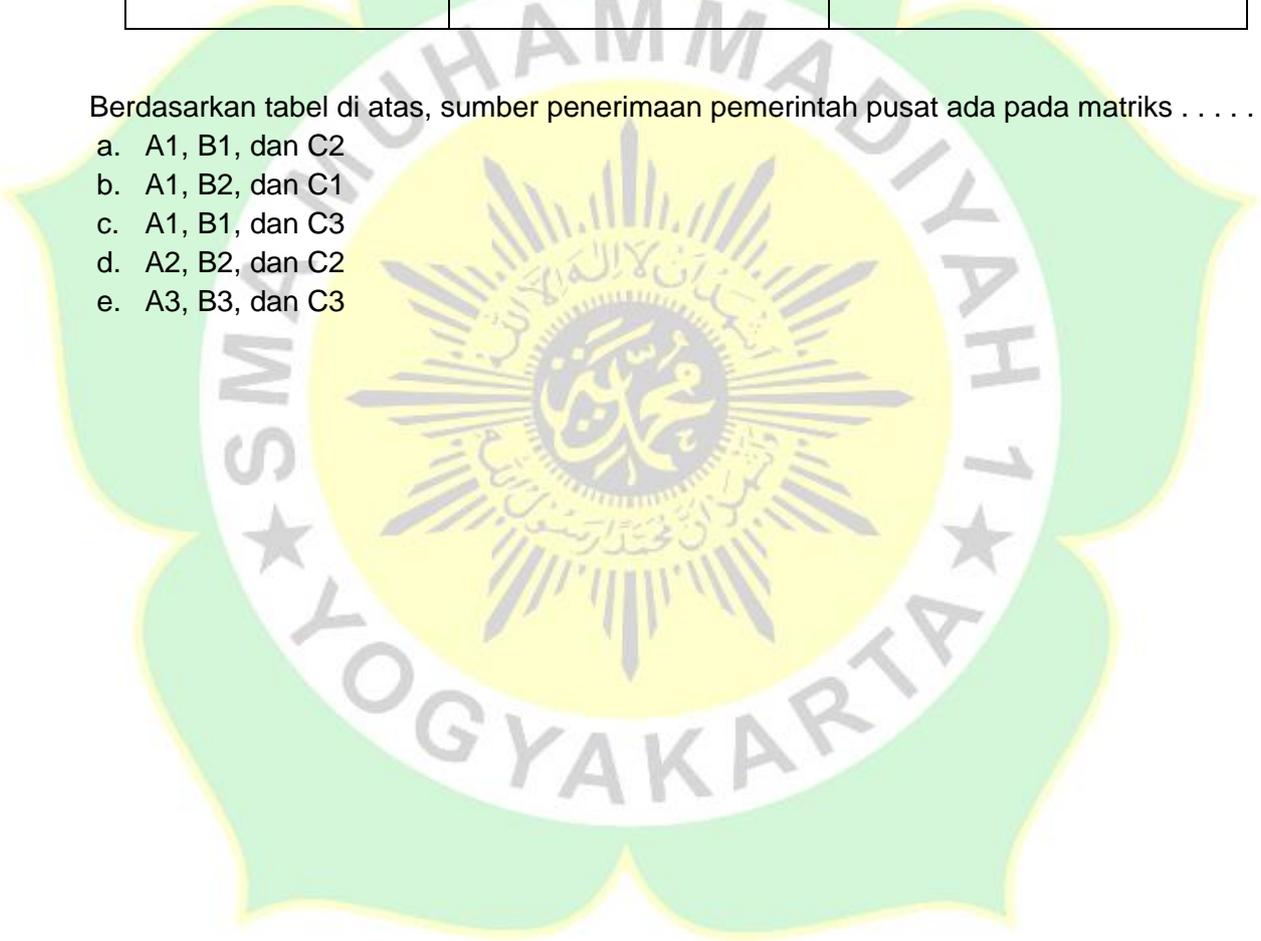
9. Jumlah penerimaan tahun 2019 adalah Rp. 1.662,5 miliar dan jumlah pengeluaran adalah Rp 1.502,0 miliar. Tahun berikutnya baik penerimaan maupun pengeluaran naik sebesar 14,3 %. Kebijakan anggaran demikian disebut....
- Defisit
 - Surplus
 - Berimbang
 - Surplus dan dinamis
 - Defisit dan dinamis

10. Perhatikan sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah berikut!

A	B	C
1.Bea materai	1.Pajak penghasilan	1.Retribusi sampah
2.Pajak orang asing	2.Pajak reklame	2.Pajak kendaraan bermotor
3.Pajak tontonan	3.Retribusi Perparkiran	3.Pajak pertambahan nilai

Berdasarkan tabel di atas, sumber penerimaan pemerintah pusat ada pada matriks

- A1, B1, dan C2
- A1, B2, dan C1
- A1, B1, dan C3
- A2, B2, dan C2
- A3, B3, dan C3



APBD

KEGIATAN BELAJAR II

2.1 KD DAN IPK

3.6 Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi.

3.6.7 Menjelaskan pengertian APBD

3.6.8 Menjelaskan fungsi dan tujuan APBD

3.6.9 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD

3.6.10 Menjelaskan komponen –komponen APBD

3.6.11 Menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian

4.6 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi.

4.6.1 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan

2.2 MATERI

A. Pengertian APBD

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Berdasarkan pengertian di atas maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud mulai dari Daerah Tingkat II kota dan kabupaten dan Daerah Tingkat I Provinsi.

B. Fungsi dan Tujuan APBD

Fungsi APBD Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat.
2. Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi APBD adalah 'uang rakyat', maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang

bersangkutan. Penyusunan APBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan.

6. Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD, di antaranya:

1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
2. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
3. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

C. Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.
4. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan.
5. Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran.
6. APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota/kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi.

D. Komponen APBD

Secara umum APBD akan memuat dua komponen besar yaitu pendapatan dan pengeluaran.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll).
- 2) Retrebusi daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Pendapatan asli daerah lain-lain.

- b. Dana Perimbangan

- 1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

- c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah
 - 1) Pendapatan hibah.
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa terdiri atas: Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah.
 - 2) Belanja Bunga
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial
 - 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
 - b. Belanja Langsung
Belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen lain yang lebih kecil lainnya seperti yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Selain itu, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

E. Pengaruh APBD pada Pembangunan Ekonomi Daerah

APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut, oleh sebab itu penyusunan APBD harus memperhatikan perencanaan pembangunan ekonomi, Berikut beberapa kesimpulan dari kajian pengaruh APBD terhadap pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1. Mengenai dampak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah.
2. Mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.
3. Mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing.
4. Mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD.

2.3 LATIHAN SOAL

Kerjakan latihan soal berikut!

1. Jelaskan pengertian APBD!
2. Salah satu sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD). Sebutkan 4 sumber pendapatan asli daerah!
3. Pemerintah daerah memperoleh dana dari pemerintah pusat yang kemudian dicantumkan dalam APBD. Jelaskan dana apa saja yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat!
4. Salah satu pos pengeluaran dalam APBN adalah transfer ke daerah. Dana otonomi khusus dan dana keistimewaan merupakan pengeluaran APBN yang diberikan kepada beberapa daerah.
 - a. Sebutkan daerah mana saja yang mendapatkan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan!
 - b. Jelaskan alasan mengapa daerah tersebut mendapatkan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan!
5. Penerimaan dalam APBD terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain – lain.
 - a. Papan reklame merupakan salah satu objek yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Mengapa demikian? Berikan penjelasan!
 - b. Selain dari papan reklame, jelaskan apa saja yang merupakan pendapatan asli daerah!

2.4 TES FORMATIF (PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Pengertian APBD adalah
 - a. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPD
 - b. Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Komite Ekonomi Nasional
 - c. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - e. Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

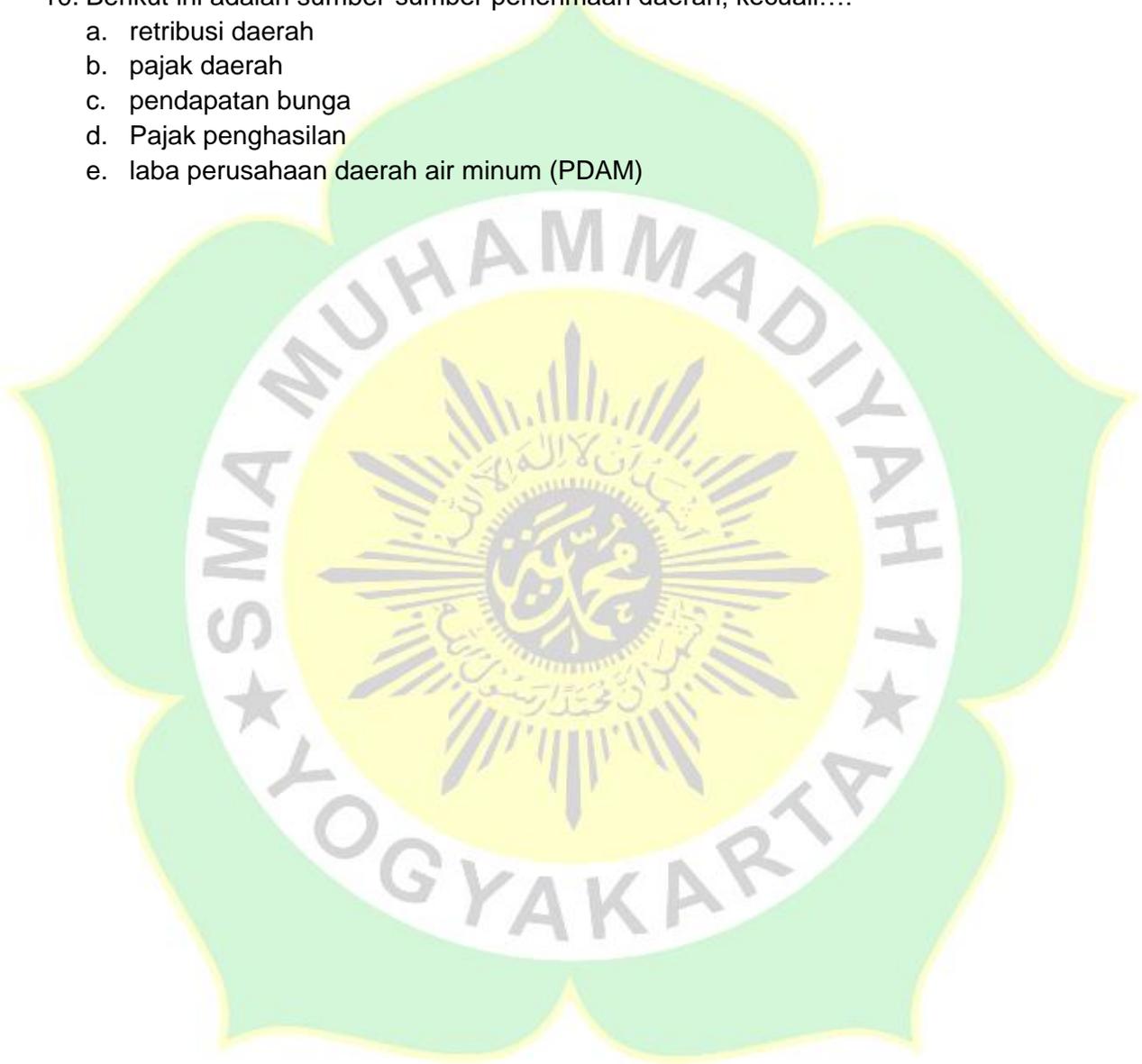
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sejumlah sumber. Di bawah ini yang merupakan sumber dari PAD adalah
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Pajak dan retribusi daerah
 - c. Penerimaan pinjaman daerah
 - d. Dana cadangan daerah
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

3. Di bawah ini merupakan dana perimbangan...
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
 - e. Dana alokasi umum dan khusus

4. Berikut ini disajikan sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
 - 1) Pajak penghasilan
 - 2) Bagian laba BUMN
 - 3) Pajak dan retribusi daerah
 - 4) Bea masuk dan pajak ekspor
 - 5) Bagian daerah dari bagi hasilDari sumber pendapatan di atas yang termasuk pendapatan daerah ada pada poin . .
 - a. 1) dan 2)
 - b. 1) dan 3)
 - c. 3) dan 4)
 - d. 3) dan 5)
 - e. 4) dan 5)

5. Struktur APBD komponen penerimaan terdiri atas
- Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
 - Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
 - Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
 - Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
 - Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan
6. Klasifikasi belanja daerah dalam APBD menurut jenis belanja adalah belanja tak langsung dan belanja langsung, yaitu sebagai berikut....
- belanja modal
 - belanja bunga
 - belanja pegawai
 - belanja bantuan sosial
 - belanja barang dan jasa
- Berdasarkan diskripsi tersebut yang merupakan belanja langsung adalah....
- (1), (2) dan (3)
 - (1), (3) dan (5)
 - (2), (4) dan (5)
 - (3), (4) dan (5)
 - (4), (5) dan (1)
7. Dibawah ini beberapa gambaran dari sector pajak dan retribusi :
- Sektor pajak penghasilan pada tahun anggaran 2013 merupakan unsur penerimaan yang tertinggi dibanding sektor lainnya
 - Kasus dari sektor penerimaan retribusi parkir di semua wilayah hampir sama, yaitu sebagian besar menguap yang tidak jelas juntrungannya
 - Pada tahun pajak 2012 masih banyak PBB yang masih tertunggak
 - Karena jumlah kendaraan bermotor perkembangannya mencapai dua kali lipat maka hal ini berdampak pada peningkatan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
 - Pada saat ini ada lima perusahaan raksasa yang sedang gencar gencarnya memasang iklan secara besar – besaran, hal ni mengakibatkan adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.
- Gambaran di atas yang dapat di golongan sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah adalah...
- 1), 2), dan 3)
 - 1), 3), dan 5)
 - 2), 3), dan 4)
 - 2), 4), dan 5)
 - 3), 4), dan 5)
8. Pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan daerah. Perbedaan antara pajak dan retribusi adalah....
- Lebih banyak anggota masyarakat yang dapat terjangkau pada retribusi
 - Pajak lebih besar nilainya daripada retribusi
 - Pajak ditarik oleh pemerintah pusat, retribusi ditarik oleh pemerintah daerah
 - Pajak memiliki berbagai macam jenis sedangkan retribusi terdiri atas satu jenis
 - Pajak dipungut tanpa kewajiban pemerintah untuk memberi imbalan langsung, sedangkan retribusi dipungut berdasarkan jasa yang kita peroleh dari pemerintah.

9. Pemerintah daerah membebaskan biaya pengawasan KTP bagi penduduknya kebijakan tersebut termasuk tujuan APBD dalam rangka....
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah
 - Menciptakan rasa aman dan penegakkan keadilan
 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - Meningkatkan lapangan pekerjaan
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10. Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan daerah, kecuali....
- retribusi daerah
 - pajak daerah
 - pendapatan bunga
 - Pajak penghasilan
 - laba perusahaan daerah air minum (PDAM)



EVALUASI BAB 1 APBN DAN APBD

Kerjakan soal evaluasi berikut dengan benar!

1. Belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus merupakan pengertian klasifikasi anggaran dalam bentuk
 - A. belanja modal
 - B. belanja pegawai
 - C. belanja hibah
 - D. belanja subsidi
 - E. belanja bunga
2. Klasifikasi belanja negara dibedakan menjadi beberapa jenis, dibawah ini manakah implementasi belanja negara yang termasuk klasifikasi belanja lain - lain....
 - A. pemerintah pusat membayar gaji dan tunjangan PNS sebesar 86,9 Triliun ditahun 2017
 - B. pembelian material oleh pemerintah pusat dalam pembangunan MRT (*Mass Rapid Transit*) di Jakarta
 - C. pembelian Rapid Tes Corona oleh pemerintah pusat dalam menangani kondisi darurat wabah covid 19
 - D. pembelian bahan makanan, tenda peralatan dapur, selimut oleh pemerintah pusat untuk disalurkan kepada pengungsi korban gempa di Lombok tahun 2018
 - E. pemerintah membayar bunga utang sebanyak Rp275,5 triliun selama tahun 2019
3. Ada berbagai macam sumber penerimaan negara yang ada dalam APBN. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari....
 - A. retribusi
 - B. pajak dalam negeri
 - C. sumber daya alam
 - D. kegiatan layanan pemerintah
 - E. pajak perdagangan internasional
4. Apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan cara....
 - A. menggunakan APBN tahun sebelumnya
 - B. menggunakan RAPBN tahun sebelumnya
 - C. pemerintah mengajukan RAPBN yang baru
 - D. pemerintah melakukan penyempurnaan RAPBN
 - E. pemerintah melakukan diskusi bersama DPR untuk mencari solusi

5. Berikut pernyataan yang menunjukkan mekanisme penyusunan APBD adalah....
- Disusun bersama-sama dengan gubernur kemudian diajukan kepada pemerintah untuk disetujui DPR
 - Disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kemudian mendapat persetujuan untuk disahkan oleh DPRD provinsi
 - Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten/kota dan disetujui oleh gubernur setempat
 - Disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan disahkan oleh DPRD kabupaten/kota setempat
 - Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten/kota dan disetujui oleh DPRD provinsi
6. Di bawah ini sebagai data Negara 'Makmur' tahun 2019.
- Penerimaan rutin Rp 80.200 M
 - Penerimaan pembangunan Rp 30.000 M
 - Pengeluaran rutin Rp 80.200 M
 - Pengeluaran pembangunan Rp 50.400 M
- Dari data di atas APBN Negara "Makmur" posisinya adalah
- surplus = Rp 80.200 milyar
 - defisit = Rp 80.200 milyar
 - defisit = Rp 20.400 milyar
 - surplus = Rp 20.400 milyar
 - defisit = Rp 80.400 milyar
7. Berikut adalah sumber penerimaan negara
- Hibah
 - Pajak Perdagangan Internasional
 - Bagian Laba BUMN
 - Penerimaan sumber daya alam
 - Pendapatan minyak mentah dan penjualan hasil tambang
- Yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah
- 1), 2) dan 3)
 - 1), 2) dan 4)
 - 2), 3) dan 4)
 - 2), 4) dan 5)
 - 3), 4) dan 5)
8. Dibawah ini yang merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah
- sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - penerimaan pinjaman daerah
 - dana cadangan daerah
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

9. Tujuan penyusunan APBN adalah....
- Pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
 - Pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah
 - Pedoman bagi pertanggungjawaban pemerintah
 - Pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen
 - Pedoman pemerintahan dalam pelaksanaan proyek pembangunan
10. Jumlah penerimaan tahun 2019 adalah Rp. 1.662,5 miliar dan jumlah pengeluaran adalah Rp 1.502,0 miliar. Kebijakan anggaran demikian disebut....
- Defisit
 - Surplus
 - Berimbang
 - Surplus dan dinamis
 - Berimbang dan dinamis
11. Pengertian APBD adalah
- Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPD
 - Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Komite Ekonomi Nasional
 - Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
12. Di bawah ini merupakan dana perimbangan...
- Pajak daerah
 - Retribusi daerah
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain PAD yang sah
 - Dana bagi hasil
13. Berikut ini disajikan sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
- 1) Pajak penghasilan
 - 2) Bagian laba BUMN
 - 3) Pajak dan retribusi daerah
 - 4) Bea masuk dan pajak ekspor
 - 5) Bagian daerah dari bagi hasil
- Dari sumber pendapatan di atas yang termasuk pendapatan daerah ada pada poin . .
- 1) dan 2)
 - 1) dan 3)
 - 3) dan 4)
 - 3) dan 5)
 - 4) dan 5)

14. Struktur APBD komponen penerimaan terdiri atas
- A. Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
 - B. Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
 - C. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
 - D. Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
 - E. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan
15. Ada berbagai macam sumber penerimaan negara yang ada dalam APBN. Bea masuk dan bea keluar merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari....
- A. retribusi
 - B. pajak dalam negeri
 - C. sumber daya alam
 - D. kegiatan layanan pemerintah
 - E. pajak perdagangan internasional
16. Dibawah ini beberapa gambaran dari sector pajak dan retribusi :
- A. Sektor pajak penghasilan pada tahun anggaran 2013 merupakan unsur penerimaan yang tertinggi dibanding sektor lainnya
 - B. Kasus dari sektor penerimaan retribusi parkir di semua wilayah hampir sama, yaitu sebagian besar menguap yang tidak jelas juntrungannya
 - C. Pada tahun pajak 2012 masih banyak PBB yang masih tertunggak
 - D. Karena jumlah kendaraan bermotor perkembangannya mencapai dua kali lipat maka hal ini berdampak pada peningkatan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
 - E. Pada saat ini ada lima perusahaan raksasa yang sedang gencar gencarnya memasang iklan secara besar – besaran, hal ni mengakibatkan adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.
17. Gambaran di atas yang dapat di golongan sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah adalah...
- A. 1), 2), dan 3)
 - B. 1), 3), dan 5)
 - C. 2), 3), dan 4)
 - D. 2), 4), dan 5)
 - E. 3), 4), dan 5)
18. Pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan daerah. Perbedaan antara pajak dan retribusi adalah....
- A. Lebih banyak anggota masyarakat yang dapat terjangkau pada retribusi
 - B. Pajak lebih besar nilainya daripada retribusi
 - C. Pajak ditarik oleh pemerintah pusat, retribusi ditarik oleh pemerintah daerah
 - D. Pajak memiliki berbagai macam jenis sedangkan retribusi terdiri atas satu jenis
 - E. Pajak dipungut tanpa kewajiban pemerintah untuk memberi imbalan langsung, sedangkan retribusi dipungut berdasarkan jasa yang kita peroleh dari pemerintah.

19. Klasifikasi belanja daerah dalam APBD menurut jenis belanja adalah belanja tak langsung dan belanja langsung, yaitu sebagai berikut....

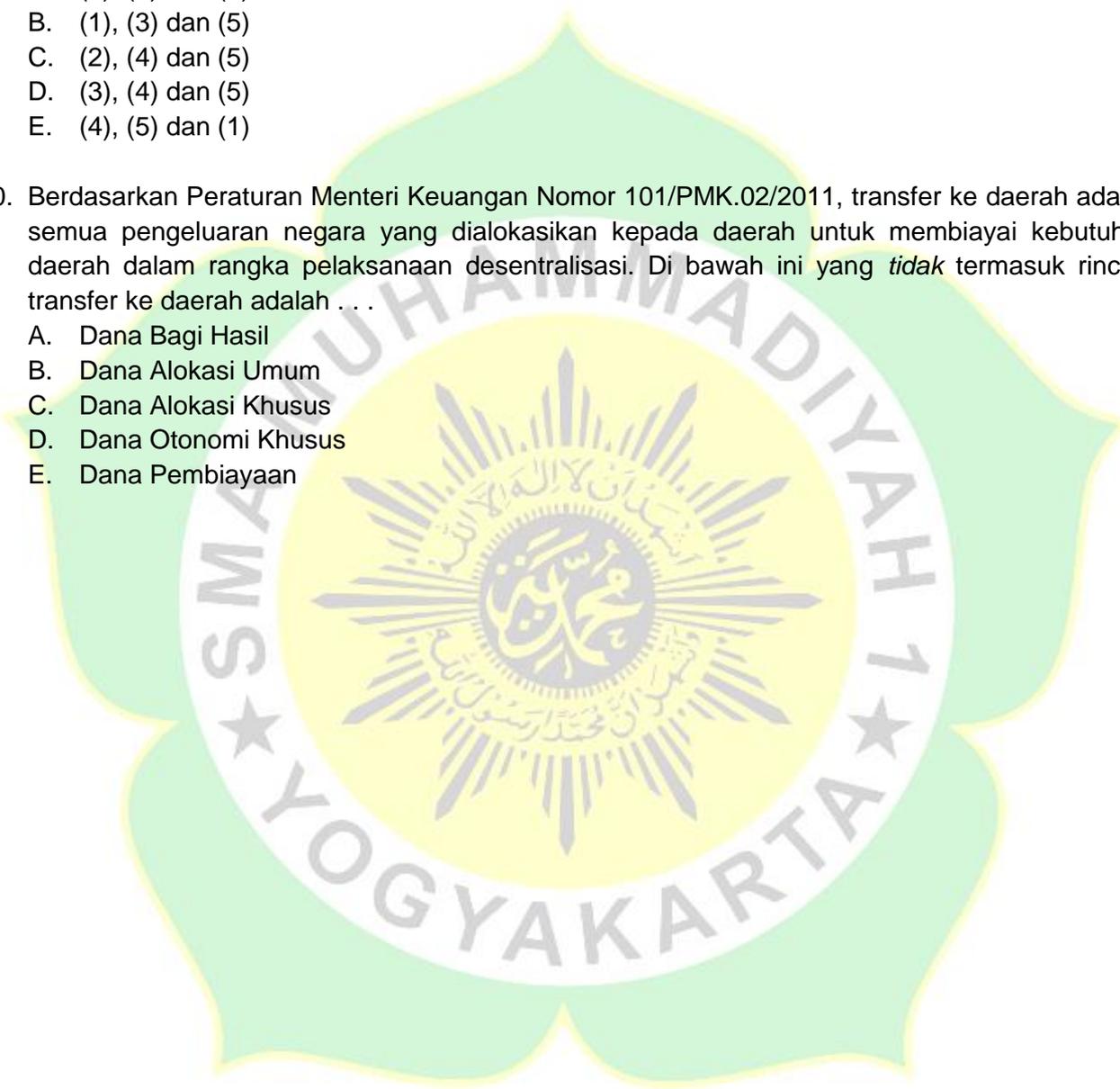
- (1) belanja modal
- (2) belanja bunga
- (3) belanja pegawai
- (4) belanja bantuan sosial
- (5) belanja barang dan jasa

Berdasarkan diskripsi tersebut yang merupakan belanja langsung adalah....

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (1), (3) dan (5)
- C. (2), (4) dan (5)
- D. (3), (4) dan (5)
- E. (4), (5) dan (1)

20. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011, transfer ke daerah adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di bawah ini yang *tidak* termasuk rincian transfer ke daerah adalah . . .

- A. Dana Bagi Hasil
- B. Dana Alokasi Umum
- C. Dana Alokasi Khusus
- D. Dana Otonomi Khusus
- E. Dana Pembiayaan



BAB 2. PERPAJAKAN

KEGIATAN BELAJAR I PAJAK

1.1. KD DAN IPK

- 3.7 Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi
 - 3.7.1 Menjelaskan pengertian pajak
 - 3.7.2 Menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak
 - 3.7.3 Menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
 - 3.7.4 Menjelaskan asas pemungutan pajak
 - 3.7.5 Menjelaskan jenis-jenis pajak
- 4.7 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi
 - 4.7.1 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan

1.2. MATERI

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Melalui pajak masyarakat ikut membiayai pembangunan. UU NO 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan defini di atas, dapat kita simpulkan ciri pajak yaitu:

1. Iuran wajib pada negara.
2. Bersifat memaksa.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Tidak mendapat balas jasa.
5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

B. Fungsi Pajak

Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara, karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, dan mengatur kegiatan ekonomi negara. Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji ASN.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulered*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi.
 - c. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor 0%.
 - d. Untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif.
- ## 3. Fungsi Pemerataan (Fungsi *Distribution*)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

C. Manfaat Pajak

Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat pajak:

1. Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI.
2. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
3. Sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
4. Memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik.
5. Membayar utang negara.
6. Menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
7. Menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah.

D. Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Tarif Pajak Proporsional (sebanding)

Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh pengenaan tarif proporsional

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Tarif pajak	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	10%	Rp5.000.000,00
Rp75.000.000,00	10%	Rp7.500.000,00
Rp100.000.000,00	10%	Rp10.000.000,00

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Contoh pengenaan tarif pajak tetap

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00
Rp100.000.000,00	Rp15.000.000,00

3. Tarif Pajak Degresif (Menurun)

Tarif pajak degresif adalah tarif yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

Contoh pengenaan tarif pajak degresif

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Tarif pajak	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	30%	Rp15.000.000,00
Rp75.000.000,00	20%	Rp15.000.000,00
Rp100.000.000,00	10%	Rp10.000.000,00

4. Tarif Pajak Progresif (Naik)

Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

Contoh pengenaan tarif progresif

Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Tarif pajak	Besarnya Pajak
Rp50.000.000,00	30%	Rp15.000.000,00
Rp75.000.000,00	20%	Rp15.000.000,00
Rp100.000.000,00	10%	Rp10.000.000,00

Perbandingannya tampak pada table berikut :

Objek Pajak	Tetap	Proporsional	Degresif	Progresif
Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00	10%	30%	10%
Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00	10%	20%	15%
Rp100.000.000,00	Rp15.000.000,00	10%	10%	20%

E. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Lainnya

Selain pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak masuk klasifikasi pajak, merupakan sumber penerimaan negara dan daerah, diantaranya:

- Retribusi, adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-rang tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi:
 - Tidak ada unsur paksaan.
 - Pembayaran tergantung kemauan si pembayar.
 - Tidak selalu menggunakan undang-undang.
 - Kontraprestasi/balas jasa langsung dirasakan si pembayar.

Contoh: pembayaran listrik, langganan air PDAM, jalan tol.
- Cukai, ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti rokok.

3. Bea Masuk, ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia, dengan maksud barang itu akan diekspor.
4. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan.

Secara ringkasnya perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, kalian lihat tabel berikut ini:

No	Dilihat dari	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
1	Dasar hukum	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya
2	Balas jasa	Tidak diterima secara langsung	Dapat diterima secara langsung
3	Objek	Umum	Orang tertentu
4	Sifat	Memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah
5	Sanksi	Sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang.	Sesuai kebijakan pemerintah
6	Jatuh tempo	Sesuai tahun pajak.	Sesuai dengan pemakaian

F. Asas Pungutan Pajak

Pemungutan pajak pada dasarnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Menurut Adam Smith Dalam bukunya *The Wealth of Nation* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

G. Jenis-Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan:

1. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Impor.
2. Berdasarkan sasaran/objeknya, digolongkan menjadi:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya (orangnya), dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi:
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota/Kabupaten. Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame.



1.3. LATIHAN SOAL

Kerjakan latihan soal berikut !

1. Jelaskan pengertian dan ciri – ciri pajak!
2. Pajak mempunyai manfaat dan peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya fungsi anggaran dan fungsi pemerataan. Jelaskan kedua fungsi tersebut! Berikan contoh aplikasi pelaksanaan fungsi tersebut di negara Indonesia!
3. Penggolongan jenis – jenis pajak dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan pemungutnya. Menurut golongannya jenis pajak dibedakan menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan jenis pajak menurut golongannya tersebut dan berikan contohnya!
4. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Diantara pajak berikut ini mana yang termasuk kedalam pajak langsung dan mana yang termasuk dalam pajak tidak langsung!

No	Jenis Pajak	Pajak langsung/ tidak langsung
a	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
c	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
d	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)
e	Cukai
f	Pajak Penghasilan (PPH)
g	Pajak Impor
h	Pajak Ekspor

5. Disamping pemerintah melakukan pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan pungutan resmi lainnya seperti retribusi, sumbangan, bea, dan cukai. Jelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya dengan membuat tabel perbedaan seperti berikut!

No	Keterangan	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
1	Balas Jasa
2	Dasar Hukum
3	Cara Perhitungan
4	Jatuh tempo
5	Sanksi
6	Sifat

1.4. TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Berikut ini merupakan unsur-unsur dalam pengertian pajak, **kecuali**
 - A. pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara
 - B. pajak dipungut berdasarkan UU
 - C. tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah
 - D. digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara
 - E. dapat dihindari oleh pemungut pajak
2. Pada saat musim kemarau panjang, debit air berkurang, sawah-sawah kekurangan air, terjadi paceklik. Produksi beras akan menurun sehingga menyebabkan kenaikan harga beras. BULOG (Badan Urusan Logistik) akan melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga beras menggunakan dana yang diperoleh dari sektor pajak, hal ini merupakan fungsi pajak
 - A. Alokasi
 - B. Distribusi
 - C. Stabilisasi
 - D. Budgetair
 - E. Anggaran
3. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya adalah....
 - A. pembayaran pajak oleh wajib pajak bersifat sukarela pungutan resmi lainnya bersifat wajib
 - B. ketentuan tentang tarif pajak bersifat tunggal, tarif pungutan resmi lainnya bersifat majemuk
 - C. pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak bersifat memaksa pungutan resmi lainnya bersifat memaksa
 - D. pajak memperoleh balas jasa langsung pungutan resmi lainnya tidak memperoleh balas jasa secara langsung
 - E. pajak dipungut berdasarkan undang-undang pungutan resmi lainnya berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan daerah

4. Perhatikan data berikut :

Pendapatan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000–Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000–Rp 500.000.000	25%
di atas Rp 500.000.000	30%

Tabel di atas menunjukkan sistem pemungutan pajak yang bersifat

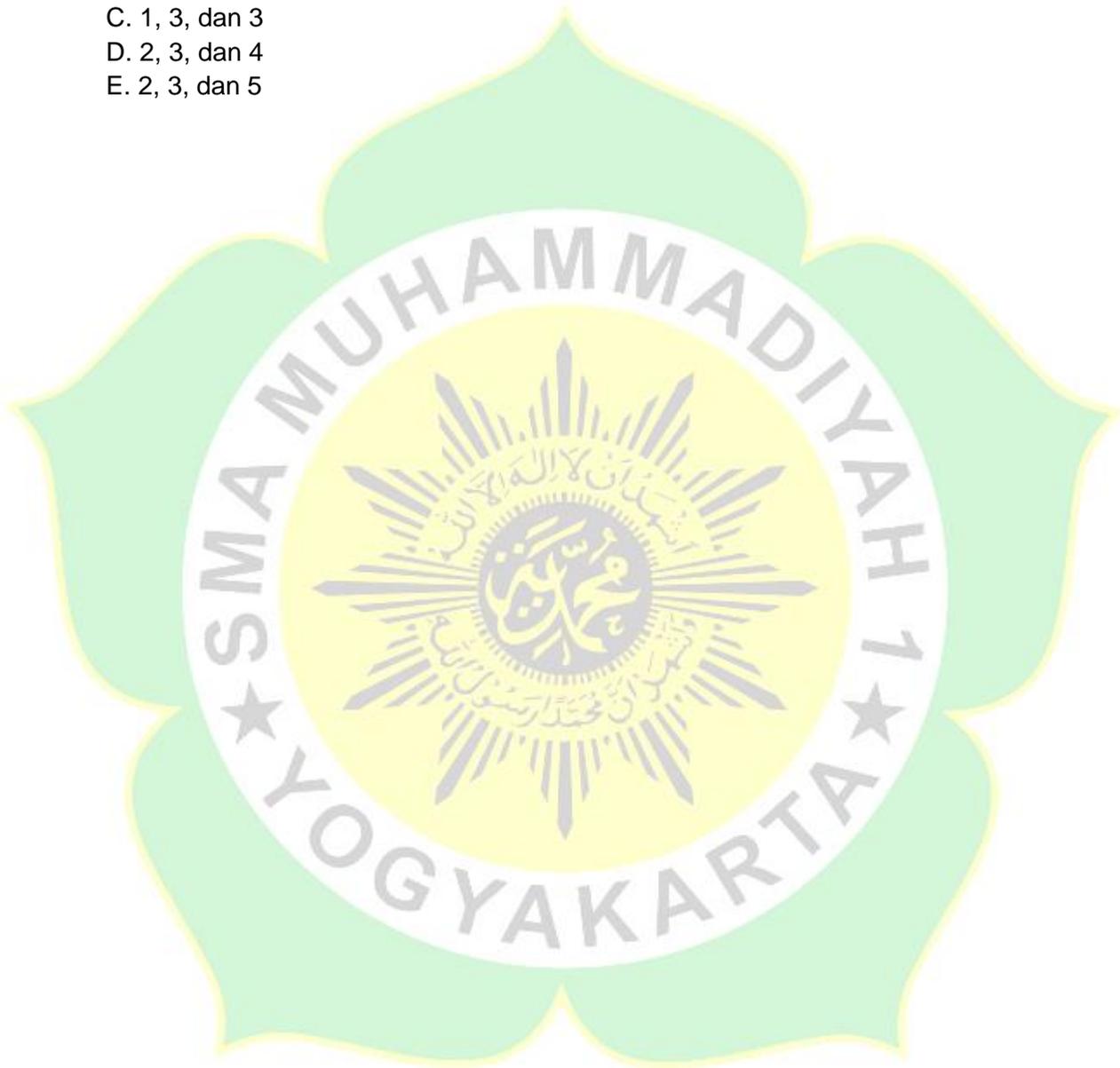
- A. degresif
- B. progresif
- C. proporsional
- D. tetap
- E. tertimbang

5. Tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang bersifat...
- degresif
 - progresif
 - proporsional
 - tetap
 - tertimbang
6. Sumber – sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari sumber berikut :
- Pajak kendaraan bermotor
 - Pajak penghasilan
 - Pajak restoran
 - Pajak reklame
 - Pajak Pertambahan Nilai
- Jenis – jenis pajak yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah...
- 1), 2) dan 3)
 - 1), 2) dan 5)
 - 1), 3) dan 4)
 - 2), 3) dan 5)
 - 3), 4) dan 5)
7. Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu...
- Pajak pusat dan pajak daerah
 - Pajak subjektif dan objektif
 - Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai
 - Pajak langsung dan tak langsung
 - Pajak perorangan dan badan hukum
8. Dibawah ini yang merupakan contoh pajak langsung adalah...
- Pajak penjualan
 - PPN
 - PPn BM
 - Bea materai
 - PPH
9. Dalam melakukan pemungutan pajak harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi, artinya mempertimbangkan agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pemungutan pajak. Hal ini merupakan asas
- kesamaan
 - daya manfaat
 - kepastian hukum
 - beban
 - kelayakan

10. Berikut ini jenis-jenis pajak:

- 1) Pajak penghasilan
 - 2) Pajak penjualan atas barang mewah
 - 3) Pajak kendaraan bermotor
 - 4) Pajak hiburan
 - 5) Pajak pertambahan nilai
- Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 4
- C. 1, 3, dan 3
- D. 2, 3, dan 4
- E. 2, 3, dan 5



SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

1.5. KD DAN IPK

- 3.7 Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi
 - 3.7.6 Menjelaskan system pemungutan pajak di Indonesia
 - 3.7.7 Menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak
 - 3.7.8 Menganalisis data dan informasi yang diperoleh serta membuat kesimpulan tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi
- 4.7 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi
 - 4.7.1 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan

1.6. MATERI

A. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Setiap negara memiliki sistem atau cara dalam pemungutan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pemungutan pajak secara umum mengenal tiga sistem, yaitu:

1. *Official Assesment System*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan.
2. *Self Assesment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak, selain penegakan hukum. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).
3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut, dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21).

B. Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

C. Cara Pengenaan Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPH)

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan (subjek pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam Pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya, juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, bentuk usaha tetap juga dimasukkan dalam kelompok subjek pajak.

c. Objek Pajak, yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak penghasilan:

- 1) Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa.
- 2) Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang.
- 4) Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi.
- 5) Royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah.
- 6) Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan sebagainya.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP:

- 1) Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) per tahun atau Rp4.500.000,00 per bulan.
- 2) Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp375.000,00 per bulan.
- 3) Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) per tahun atau Rp4.500.000,00 per bulan.
- 4) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp375.000,00 per bulan.

e. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17, Tarif Pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak dan besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan PKP (Penghasilan Kena Pajak). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, Tarif Pajak yang ditetapkan atas penghasilan sebagai berikut:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri adalah:

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
		Ber NPWP	Tidak ber NPWP
1.	Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%	6%
2.	Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%	18%
3.	Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%	30%
4.	Di atas Rp500.000.000,00	30%	36%

Keterangan:

PKP= Penghasilan bersih per tahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Contoh 1 :

Penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi, Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp525.000.000,00. Maka Pajak Penghasilan yang terutang:

$$\begin{aligned}
 &5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 &15\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00 \\
 &25\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}62.500.000,00 \\
 &30\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 7.500.000,00 + \\
 &\text{Jumlah Pajak terutang} = \underline{\underline{\text{Rp}102.500.000,00}}
 \end{aligned}$$

Contoh 2 :

Pak Yusuf sebagai karyawan di sebuah Perusahaan, penghasilan neto setiap bulannya Rp25.000.000,00. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja dan mempunyai 4 anak. Pak Yusuf memiliki NPWP. Berapakah pajak terutang setiap bulannya?

Jawab:

$$\text{Penghasilan neto 12 bulan} \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$$

$$\text{PTKP: - wajib pajak} = \text{Rp}54.000.000,00$$

$$\text{- isteri} = \text{Rp } 4.500.000,00$$

$$\text{- anak (maks 3)}$$

$$3 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}13.500.000,00 +$$

$$\text{Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)} = \underline{\underline{\text{Rp } 72.000.000,00 \text{ (-)}}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \underline{\underline{\text{Rp } 228.000.000,00}}$$

Jadi, PPh terutang per tahun:

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\ 15\% \times \text{Rp } 178.000.000,00 &= \underline{\text{Rp } 26.700.000,00} + \\ &= \underline{\text{Rp } 29.200.000,00} \end{aligned}$$

Pajak penghasilan perbulan = $\text{Rp } 29.200.000,00 : 12 = \text{Rp } 2.433.333,33$.

2) Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Untuk menghitung pajak ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Wajib Pajak Badan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Peredaran Bruto (omzet) Merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/ outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
- b) Objek Pajaknya Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, serta besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).
- c) Jenis usaha yang dikenakan Jenis usaha yang dikenakan diantaranya: usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.
- d) Subjek Pajaknya Subyek pajak adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Contoh 1:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp500 juta. Penghitungan pajak yang terutang: seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. X tidak melebihi Rp4,8 miliar.

PPh yang terutang: $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 62,5 \text{ juta}$.

Contoh 2 :

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp3 miliar. Penghitungan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas:

- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: $(\text{Rp } 4,8 \text{ miliar} : \text{Rp } 30 \text{ miliar}) \times \text{Rp } 3 \text{ miliar} = \text{Rp } 480 \text{ juta}$.

- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp3 miliar – Rp480 juta = Rp2,52 miliar.

PPH yang terutang:

- $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}480 \text{ juta} = \text{Rp}60 \text{ juta}$.
- $25\% \times \text{Rp}2,52 \text{ miliar} = \text{Rp}630 \text{ juta}$.

Jumlah PPh yang terutang = Rp60 juta + Rp630 juta = Rp690 juta.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau eFaktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan di samping PPN, artinya untuk barang mewah selain kena PPN juga dikenakan PPnBM.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

c. Tarif Pajak PPN dan PPnBM

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7:

- 1) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen). Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM ialah:

- Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

$PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Contoh 1:

Seorang PKP bernama Ibrahim menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp30.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$.

PPN sebesar Rp3.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Ibrahim.

Contoh 2: Pengusaha Kena Pajak "D" mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%.

Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak = Rp5.000.000,00

$PPN = 10\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}500.000,00$.

$PPn\ BM = 20\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pada bulan September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Atas dasar tersebut pemerintah mengalihkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Mulai tanggal 1 Januari 2014 PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

b. Subjek Pajak PBB

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini:

- 1) Mempunyai hak atas bumi.
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi.
- 3) Memiliki bangunan.
- 4) Menguasai bangunan.
- 5) Memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Objek Pajak PBB

Menurut pasal 77 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009, Objek pajak PBB adalah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan menurut pasal 3, objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 80 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP). Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp10.000.000,00 untuk

setiap Wajib pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

$$\text{Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Contoh

Tuan Yunus memiliki objek pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan:
Tanah seluas 500 m² dengan nilai Jualnya Rp500.000,00 per m², rumah seluas 200 m² dengan nilai jualnya Rp600.000,00 per m².

Hitunglah besarnya PBB yang terutang jika diketahui besarnya NJOPTKP Rp10.000.000,00 dan tarif yang dikenakan sebesar 0,1%.

Jawab:

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

$$\begin{aligned} \text{Tanah: } & 500 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 500.000,00 & = \text{Rp}250.000.000,00 \\ \text{Bangunan: } & 200 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 600.000,00 & = \text{Rp}120.000.000,00 + \\ & & = \text{Rp}370.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak} = \text{Rp}10.000.000,00 \text{ (-)}$$

$$\text{NJOP untuk Penghitungan PBB} = \text{Rp}360.000.000,00$$

$$\text{PBB Terutang} = 0,1\% \times \text{Rp}360.000.000,00 = \text{Rp } 360.000,00.$$

4. Bea Materai

a. Pengertian Bea Materai

Bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak.

b. Dokumen yang dikenakan Bea Materai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, berikut ini daftar dokumen yang dikenakan materai.

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- 4) Surat yang memuat jumlah uang, di antaranya: Surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
- 6) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengendalian, yaitu: Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula.

7) Tarif Bea materai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, besarnya bea meterai sebagai berikut:

- a) Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat lamaran sebesar Rp6.000,00.
- b) Dokumen nominal Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 sebesar Rp3.000,00. Lebih dari Rp1.000.000,00 sebesar Rp 6.000,00.
- c) Cek dan bilyet giro sebesar Rp3.000,00.



1.7. LATIHAN SOAL

Kerjakan soal berikut dengan singkat dan benar!

1. Jelaskan 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia!
2. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.
 - a. Bagaimanakah peraturan atau ketentuan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) menurut UU No.28 Tahun 2009?
 - b. Berdasarkan tarifnya, tarif PBB termasuk ke dalam jenis tarif pajak apa? Berikan penjelasan!
3. Menurut undang-undang, yang termasuk dalam barang mewah dan wajib pajak PPnBM adalah barang yang tergolong dalam beberapa kategori, jelaskan 4 kategori barang mewah yang dimaksud! Bagaimana ketentuan tarif pajak PPnBM yang berlaku, apakah persentasenya selalu sama setiap barang mewah? Jelaskan alasanmu!
4. Pak Ilham adalah memiliki 2 buah rumah yang terletak di Bandung. Objek pertama terletak di jalan Merdeka dan objek kedua terletak di jalan Pancasila, dengan luas dan NJOP sebagai berikut :

LOKASI	KEKAYAAN	LUAS (m ²)	NJOP (Rp)
Jalan Merdeka	Tanah	200	2.000.000
	Bangunan	150	3.000.000
Jalan Pancasila	Tanah	320	2.500.000
	Bangunan	270	3.500.000

Daerah tersebut menetapkan tarif PBB perdesaan dan perkotaan 0,2% dan NJOPTKP ditetapkan Rp 20.000.000. Hitunglah PBB terutang Pak Ilham atas kedua objek tersebut! (tarif menurut UU No.28 Tahun 2009)

5. Pak Rudi adalah pegawai swasta dengan penghasilan Rp. 30.000.000,- per bulan. Setiap bulan ia mendapatkan tunjangan jabatan Rp. 2.500.000,- dan premi asuransi Rp. 1.500.000,-. Setiap bulan ia harus membayar biaya jabatan 5% dari pendapatan brutonya dan biaya pensiun Rp. 1.300.000,-. Pak Rudi sudah menikah 2 tahun yang lalu (istri tidak bekerja) dan memiliki 4 anak.

Lapisan PKP	Tarif
Sampai Rp 50.000.000	5 %
Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya PPh terutang per bulan yang ditanggung oleh pak Rudi!

1.8. TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Dalam suatu acara Aldi mendapatkan hadiah undian 1 unit mobil, dengan ketentuan pajak ditanggung pemenang yang dibebankan ke Aldi sebesar Rp 20.000.000,00.



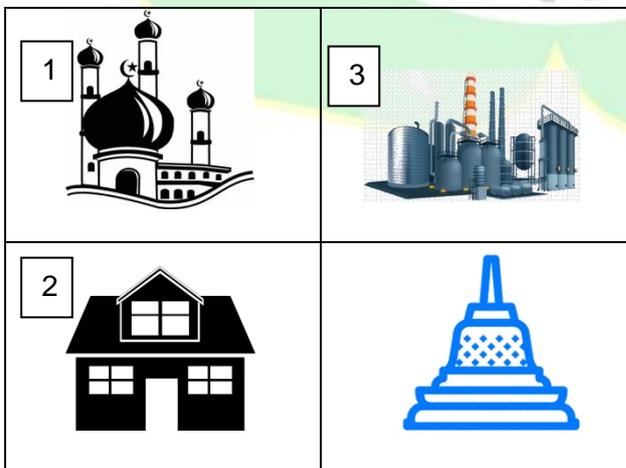
Dari ilustrasi cerita di atas sistem pemungutan pajak yang dibebankan kepada Aldi sebagai pihak ketiga merupakan sistem pemungutan pajak

- A. *with holding Tax System*
 - B. *official Assessment System*
 - C. *self Assessment System*
 - D. *self Payment System*
 - E. *official Payment System*
2. Diketahui tarif Pajak Penghasilan sbb.:

Pendapatan Kena Pajak	Tarif Pajak
0– Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000–Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000–Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	35%

Apabila Yusuf memiliki penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 80.000.000,00 setahun, maka besarnya pajak terutang adalah

- A. Rp 6.000.000,00
 - B. Rp 7.000.000,00
 - C. Rp 8.000.000,00
 - D. Rp 8.250.000,00
 - E. Rp 9.000.000,00
3. Perhatikan gambar dibawah ini



Dari gambar di atas objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu

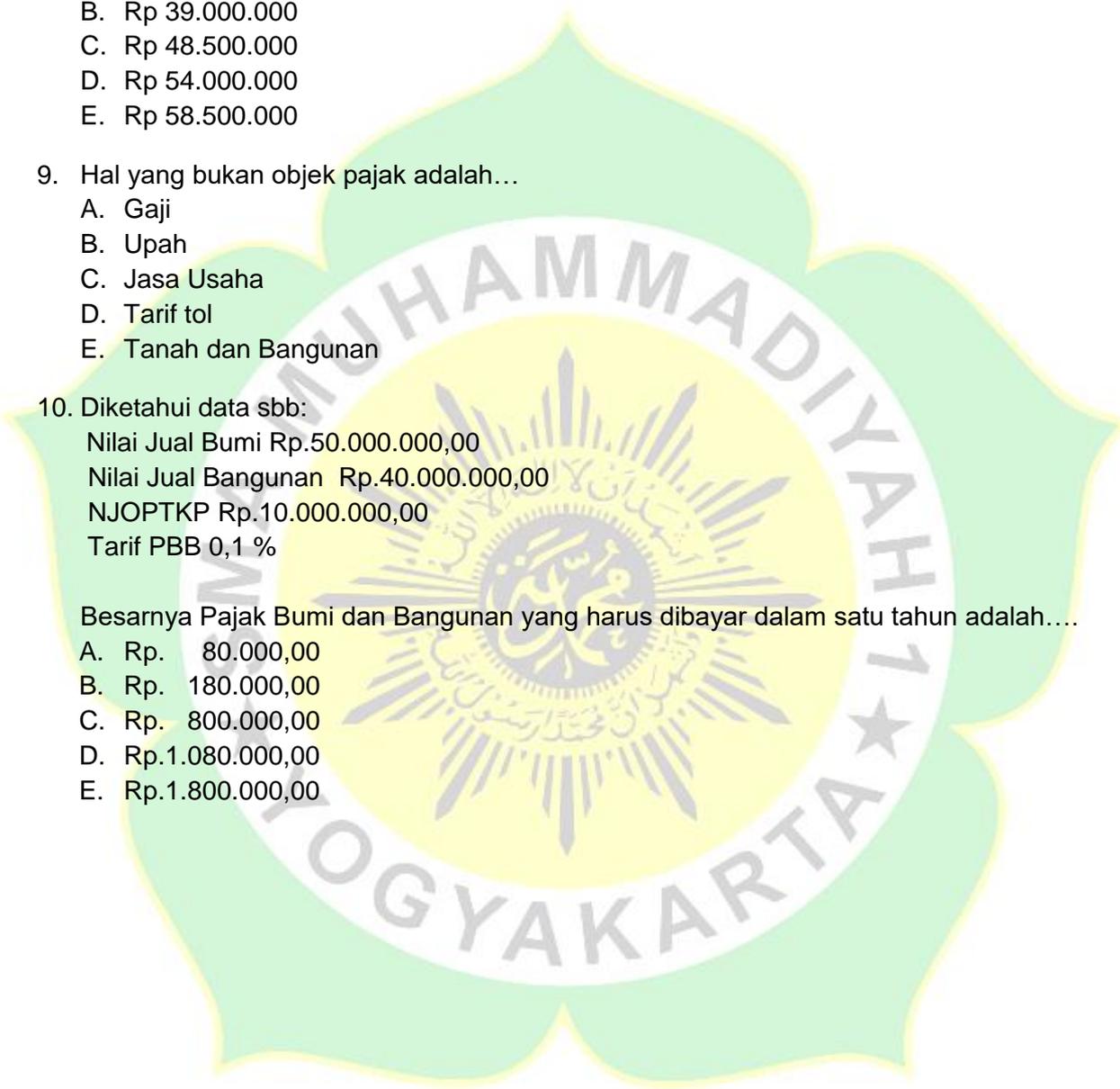
- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 1 dan 4
- D. 2 dan 4
- E. 3 dan 4

4. Diketahui tarif Pajak Penghasilan sbb.:

Pendapatan Kena Pajak	Tarif Pajak
0– Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000–Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000–Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	35%

Seorang Wajib Pajak yang memiliki PKP (Penghasilan Kena Pajak) dalam satu tahun sebesar Rp.400.000.000,00, dikenakan pajak satu tahun sebesar....

- A. Rp. 20.000.000,00
 - B. Rp. 60.000.000,00
 - C. Rp. 70.000.000,00
 - D. Rp.100.000.000,00
 - E. Rp.120.000.000,00
5. Pernyataan berikut ini yang benar dalam hubungannya dengan ketentuan tentang tarif pajak di Indonesia adalah....
- A. tarif Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak
 - B. tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %
 - C. tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah serendah-rendahnya 5%, setinggi- tingginya 15%
 - D. tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak
 - E. tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 5%, 15%, 25% dan 35%
6. Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan berikut ini
- (1) laba usaha
 - (2) subyek pajak
 - (3) domisili wajib pajak
 - (4) keuntungan karena penjualan
 - (5) hadiah undian atau penghargaan
- Berdasarkan diskripsi tersebut yang merupakan Obyek Pajak Penghasilan adalah....
- A. (1), (2) dan (3)
 - B. (1), (4) dan (5)
 - C. (2), (3) dan (4)
 - D. (2), (3) dan (5)
 - E. (3), (4) dan (5)

- 
7. Subjek pajak penghasilan adalah...
- A. Orang pribadi atau badan
 - B. Orang pribadi
 - C. Badan usaha
 - D. Penghasilan
 - E. Bumi dan bangunan
8. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak kawin sebesar...
- A. Rp 4.500.000
 - B. Rp 39.000.000
 - C. Rp 48.500.000
 - D. Rp 54.000.000
 - E. Rp 58.500.000
9. Hal yang bukan objek pajak adalah...
- A. Gaji
 - B. Upah
 - C. Jasa Usaha
 - D. Tarif tol
 - E. Tanah dan Bangunan
10. Diketahui data sbb:
- Nilai Jual Bumi Rp.50.000.000,00
 - Nilai Jual Bangunan Rp.40.000.000,00
 - NJOPTKP Rp.10.000.000,00
 - Tarif PBB 0,1 %
- Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar dalam satu tahun adalah....
- A. Rp. 80.000,00
 - B. Rp. 180.000,00
 - C. Rp. 800.000,00
 - D. Rp.1.080.000,00
 - E. Rp.1.800.000,00

EVALUASI BAB 2 PERPAJAKAN

1. Perhatikan diskripsi berikut ini
 - 1) iuran dari rakyat kepada negara
 - 2) memperoleh balas jasa secara langsung
 - 3) pungutannya didasarkan atas peraturan daerah
 - 4) dipungut berdasarkan undang undang dan bisa dipaksakan
 - 5) tidak ada kontra prestasi secara langsung dari pemerintah kepada warga negara

Berdasarkan diskripsi tersebut yang merupakan ciri khas pajak adalah....

- A. 1), 2) dan 3)
 - B. 1), 4), dan 5)
 - C. 2), 3) dan 4)
 - D. 2), 4) dan 5)
 - E. 3), 4) dan 5)
2. Jenis pajak menurut pihak yang memungut dibedakan menjadi dua, yaitu...
 - A. Pajak langsung dan tak langsung
 - B. Pajak pusat dan pajak daerah
 - C. Pajak subjektif dan objektif
 - D. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai
 - E. Pajak perorangan dan badan hukum
 3. Manfaat pajak dirasakan oleh semua warga negara dan merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar. Berikut manfaat yang dirasakan oleh warga negara atas pajak yang dibayar, *kecuali*
 - A. kemudahan dalam berbagai infrastruktur di seluruh daerah secara merata
 - B. kemudahan dalam memperoleh jaminan kesehatan dan pendidikan
 - C. para petani memperoleh subsidi pupuk untuk kegiatan pertanian
 - D. menggunakan fasilitas internet bebas bayar diseluruh wilayah
 - E. memperoleh modal dan pembinaan bagi usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM)
 4. Ada berbagai macam sistem Pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah tanpa melibatkan pihak ketiga dan wajib pajak bersifat pasif, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain lain merupakan contoh sistem pemungutan pajak....
 - A. *full system*
 - B. *government system*
 - C. *with holding system*
 - D. *self-assessment system*
 - E. *official assessment system*

5. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembanunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. hal ini merupakan fungsi pajak
- Alokasi
 - Distribusi
 - Stabilisasi
 - Mengatur
 - Anggaran

6. Tabel pendapatan dan tarif pajak :

PKP (juta)	Tarif 1	Tarif 2	Tarif 3	Tarif 4
Rp20	10%	5%	15%	100.000
Rp40	10%	10%	10%	100.000
Rp60	10%	15%	5%	100.000

- Berdasarkan tabel di atas tarif 2 menunjukkan sistem pemungutan pajak yang bersifat
- degresif
 - progresif
 - proporsional
 - tetap
 - tertimbang
7. Subjek pajak penghasilan adalah...
- Orang pribadi atau badan
 - Orang pribadi
 - Badan usaha
 - Penghasilan
 - Bumi dan bangunan
8. Pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain disebut...
- Pajak langsung
 - Pajak daerah
 - Pajak pusat
 - Pajak tidak langsung
 - Retribusi jasa usaha
9. Tuan Hidayat pemilik PT Bintang, dilihat dari subjeknya pada saat perhitungan pajak perusahaannya dikenakan aturan pajak...
- Perseorangan
 - Penghasilan
 - Badan
 - Langsung
 - Tidak langsung

10. Perhatikan jenis – jenis pajak berikut.
- 1) Pajak kendaraan bermotor
 - 2) pajak penjualan
 - 3) Pajak pertambahan nilai
 - 4) Pajak penghasilan
 - 5) Pajak bumi dan bangunan
- jenis pajak langsung terurai pada poin...
- A. 1) dan 2)
 - B. 1) dan 4)
 - C. 2) dan 3)
 - D. 3) dan 5)
 - E. 4) dan 5)
11. Tarif pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah objek pajak dan besarnya pajak tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak, disebut tarif pajak...
- A. Progresif
 - B. Degresif
 - C. Proporsional
 - D. Regresif
 - E. Tetap
12. Semakin tinggi pendapatan atau kekayaan seseorang, dikenakan pajhak dengan presentase yang semakin tinggi pula. Sistem pemungutannya disebut...
- A. Regresif
 - B. Progresif
 - C. Proporsional
 - D. Degresif
 - E. Intensif
13. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri *Official Assessment System* pada sistem pemungutan pajak yaitu....
- A. Pajak ditentukan aparat pajak
 - B. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - C. Fiscus hanya mengawasi.
 - D. Wajib Pajak bersifat aktif.
 - E. Pajak ditentukan Wajib Pajak.
14. Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang sendiri, dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada wajib pajak system ini dinamakan ...
- A. *Rental Official system*
 - B. *Official assessment system*
 - C. *Withholding system*
 - D. *Self assessment system*
 - E. *Economic Official system*

15. Berikut ini jenis pajak pusat dan daerah.

- 1) Pajak kendaraan bermotor
 - 2) Pajak bumi dan bangunan
 - 3) Pajak penghasilan
 - 4) Pajak pertambahan nilai
 - 5) Pajak reklame
- yang termasuk pajak daerah...

- A. 1), 2), dan 3)
- B. 1), 2), dan 5)
- C. 1), 3), dan 4)
- D. 1), 4), dan 5)
- E. 2), 3), dan 5)

16. Pengaruh penarikan pajak terhadap perekonomian adalah...

- A. sumber penghasilan untuk membiayai pembangunan ekonomi
- B. factor yang dapat menentukan kegiatan produksi
- C. alat untuk meratakan pembagian penghasilan nasional
- D. alat untuk mengurangi tekanan inflasi
- E. Pendapatan Negara yang sangat berpengaruh

17. Diketahui tarif Pajak Penghasilan sbb.:

Pendapatan Kena Pajak	Tarif Pajak
0– Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000–Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000–Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	35%

Seorang Wajib Pajak yang memiliki PKP (Penghasilan Kena Pajak) dalam satu tahun sebesar Rp.300.000.000,00, dikenakan pajak satu tahun sebesar....

- A. Rp. 25.000.000,00
- B. Rp. 45.000.000,00
- C. Rp. 75.000.000,00
- D. Rp.105.000.000,00
- E. Rp.125.000.000,00

18. Pegawai nikah memiliki 1 anak dengan gaji sebulan Rp 3.500.000. Besarnya PPh yang dibayar adalah...

- A. Rp 24.300.000
- B. Rp 14.332.500
- C. Rp 12.967.500
- D. Rp 13.650.000
- E. tidak bayar pajak

19. Diketahui tarif Pajak Penghasilan sbb.:

Pendapatan Kena Pajak	Tarif Pajak
0– Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000–Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000–Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	35%

Bapak Iwan seorang manajer mempunyai penghasilan per bulan Rp 22.000.000 status menikah mempunyai anak 1. Besarnya PPh terutang yang harus dibayar Bapak Iwan adalah...

- A. Rp 11.000.000
- B. Rp 16.400.000
- C. Rp 25.150.000
- D. Rp 65.000.000
- E. Rp 79.200.000

20. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai jenis pajak berdasarkan sistem pemungutannya, yaitu

- A. pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, contohnya Pajak Penjualan
- B. pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan
- C. pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan
- D. pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor.
- E. pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya didasarkan atas kemampuan dan keadaan wajib pajak, misalnya Pajak Penghasilan

21. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dalam satu tahun untuk WP (Wajib Pajak) yang belum menikah sebesar Rp.54.000.000,00. Bagi WP yang penghasilannya kurang dari PTKP tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Negara memungut pajak dan hasilnya digunakan untuk pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini merupakan manfaat pajak sebagai

- A. tanggung jawab sosial
- B. alat pemerataan ekonomi
- C. sumber penerimaan negara
- D. pendorong kegiatan ekonomi
- E. menjaga stabilitas perekonomian nasional

22. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTK) untuk tambahan anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal ... orang.

- A. satu
- B. dua
- C. tiga
- D. empat
- E. lima

23. Sebagian sepeda motor di Indonesia merupakan produk impor. Jika harga sepeda motor merk X Rp20.000.000,00, maka harga jual setelah ditambah PPN adalah
- A. Rp20.000.000,00
 - B. Rp22.000.000,00
 - C. Rp22.200.000,00
 - D. Rp24.000.000,00
 - E. Rp24.400.000,00
24. Anggi memiliki sebidang tanah seluas 200 m² dan di atasnya berdiri rumah seluas 140 m². Taksiran harga jual tanah Rp600.000,00 per m² dan harga jual bangunan Rp1.000.000,00 per m². Apabila NJOTKP Rp12.000.000,00 dan tariff pajak 0,1%, maka PBB terutang Anggi
- A. Rp182.000,00
 - B. Rp232.000,00
 - C. Rp248.000,00
 - D. Rp284.000,00
 - E. Rp322.000,00
25. Pengaruh penarikan pajak terhadap perekonomian adalah...
- A. Salah satu sumber penghasilan untuk membiayai pembangunan ekonomi
 - B. Salah satu faktor yang dapat menentukan kegiatan produksi
 - C. Salah satu alat untukmeratakan pembagian penghasilan nasional
 - D. Salah satu alat untuk mengurangi tekanan inflasi
 - E. Pendapatan negara yang sangat berpengaruh



BAB 3. KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

KEGIATAN BELAJAR I

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

1.1 KD DAN IPK

- 3.8 Mendeskripsikan kerja sama ekonomi internasional.
 - 3.8.1 Menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional
 - 3.8.2 Menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional
 - 3.8.3 Menjelaskan bentuk – bentuk kerjasama ekonomi internasional
 - 3.8.4 Menjelaskan lembaga – lembaga kerjasama ekonomi internasional
 - 3.8.5 Mengolah data/ informasi untuk membuat kesimpulan tentang kerjasama ekonomi internasional

- 4.8 Menyajikan bentuk dan manfaat kerja sama ekonomi internasional.
 - 4.8.1 Menyajikan bentuk dan manfaat kerja sama ekonomi internasional melalui media lisan dan tulisan

1.2 MATERI

A. Pengertian Kerjasama Ekonomi Internasional

Kerja sama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

B. Manfaat Kerjasama Ekonomi Internasional

1. Memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara
2. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerja sama di berbagai bidang.
3. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia
4. Terjadinya alih teknologi
5. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan.
6. Meningkatkan devisa negara.

C. Bentuk Kerjasama Ekonomi Internasional

1. Kerja Sama Ekonomi Bilateral
Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerja sama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contoh: pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia.

2. Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh banyak negara.
3. Kerja sama regional
Kerja sama regional adalah kerja sama antara beberapa negara dalam satu kawasan.
Contoh: ASEAN, MEE, dan lain-lain.
4. Kerja sama internasional
Kerja sama internasional adalah kerja sama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contoh: IMF, ILO, OPEC, dan lain-lain.

D. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional

1. ASEAN (*Association of South East Asian Nation*)

ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerja sama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, lima negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan melibatkan komite di berbagai bidang.

2. AFTA (*ASEAN Free Trade Area Area*)

AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah forum kerja sama antarnegara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang sesama negara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada Januari 1992. Berikut ini beberapa tujuan AFTA.

- a) Meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN.
- b) Meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN.
- c) Meningkatkan investasi bagi negara ASEAN.

3. APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation Cooperation*)

APEC merupakan forum kerja sama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Keberadaan APEC atas prakarsa Bob Hawke (perdana menteri Australia). Tujuan dari APEC tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020. Untuk mencapai tujuannya, APEC dalam melakukan kegiatannya selalu berlandaskan pada prinsip kesepakatan bersama yang sifatnya tidak mengikat, dialog terbuka, serta prinsip saling menghargai pandangan dan pendapat seluruh anggota. Keputusan yang diambil oleh APEC dibuat berdasarkan konsensus dan kesepakatan yang sifatnya sukarela.

4. EU (*European Union*)

European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerja sama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian komunitas energi atom (European Atomic Energi Community) dan komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Lembaga-lembaga

tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi yaitu Masyarakat Eropa (ME) dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa. Kegiatan Uni Eropa pada awalnya hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi sejalan dengan penambahan anggota Uni Eropa, berkembang pula bentuk kerja sama itu. Kerja sama tersebut adalah dalam bidang ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik.

5. EFTA (*European Free Trade Area Area*)

EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal.

6. ADB (*Asian Development Bank Bank*)

ADB atau Bank Pembangunan Asia, didirikan tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah.

7. IMF (*International Monetary Found*)

IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan tanggal 27 September 1945. Tujuan pokok IMF adalah ingin meningkatkan bisnis internasional guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di negara anggota.

8. WTO (*World Trade Organization*)

WTO atau organisasi perdagangan dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antarnegara serta mengatasi perselisihan perdagangan antarnegara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade (GATT). GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikannya GATT ialah untuk mengurangi hambatan perdagangan antarnegara dengan memerhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. GATT dibubarkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 Desember 1995. Pembubaran GATT dilakukan setelah organisasi ini berjalan berdampingan dengan WTO.

9. ILO (*International Labour Organization Organization*)

ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa Melalui Traktat Versailles (Treaty of Versailles) pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatannya adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial.

10. OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*)

OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas prakarsa lima negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, pada pertemuan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. OPEC berkedudukan di Wina, Austria. OPEC mempunyai beberapa tujuan berikut ini.

a) Menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota.

- b) Memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi.
- c) Menstabilkan harga minyak dunia.
- d) Menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota.

OPEC berupaya menstabilkan harga minyak di pasar internasional dan menjamin kesinambungan pasokan minyak kepada negara-negara konsumen. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional adalah melalui penentuan kuota (batas tertinggi) produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota.. Negara-negara anggota OPEC antara lain Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Uni Emirat Arab, Qatar, Alberia, Indonesia, Aljazair, dan Lybia.

1.3 LATIHAN SOAL

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Jelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional!
2. Jelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional!
3. Jelaskan bentuk – bentuk kerjasama ekonomi internasional! Berikan contoh!
4. Sebutkan dan jelaskan lembaga kerjasama ekonomi internasional :
 - a. ASEAN
 - b. AFTA
 - c. APEC
 - d. EFTA
5. Jelaskan tujuan didirikan lembaga kerjasama ekonomi internasional :
 - a. IMF
 - b. WTO
 - c. ILO

1.4 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Perbedaan kerja sama bilateral dengan kerja sama multilateral adalah ...
 - A. kerja sama bilateral berlaku pada bidang ekonomi saja, sedangkan kerjasama multilateral yaitu pada bidang yang tidak terbatas
 - B. kerja sama bilateral terbatas pada bidang tertentu, sedangkan kerja sama multilateral mencakup berbagai bidang
 - C. kerja sama bilateral terbatas pada kawasan tertentu, sedangkan kerja sama multilateral mencakup kawasan yang tidak terbatas
 - D. kerja sama bilateral berlaku pada jangka waktu tertentu, sedangkan kerja sama multilateral untuk jangka waktu yang tidak terbatas
 - E. kerja sama bilateral terbatas pada dua negara, sedangkan multilateral terjadi lebih dari 3 negara

2. Economic and Social Council (ECOSOC) adalah organisasi di bawah naungan PBB yang bertujuan...
 - A. Mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan
 - B. Memberikan bantuan berupa proyek dalam pembangunan
 - C. Memperbaiki persyaratan kerja
 - D. Meningkatkan jumlah mutu pangan
 - E. Memajukan perkembangan industri di negara – negara berkembang dengan cara memberikan bantuan teknis berupa program – program latihan dan informasi.

3. Berikut ini yang merupakan merupakan faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional adalah
 - A. jumlah sumber daya alam yang berlimpah
 - B. adanya paksaan dari negara lain
 - C. perbedaan sumber daya, iklim, sosial, dan budaya
 - D. mempercepat pembangunan nasional
 - E. meningkatkan ekspor

4. *International Monetary Fund* (IMF) merupakan kerja sama internasional dalam bidang
 - A. produksi
 - B. perburuhan
 - C. perdagangan dan tariff
 - D. keuangan
 - E. kesehatan

5. Melalui kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan Jepang diharapkan kualitas produk yang dihasilkan Indonesia dan dijual ke Jepang semakin lama semakin meningkat, karena Jepang menerapkan standar tinggi untuk produk impor dari Negara lain. Dalam hal ini manfaat yang diperoleh Indonesia adalah....
 - A. membuat perimbangan hubungan dagang
 - B. membantu meningkatkan daya saing ekonomi
 - C. memperoleh devisa negara terhadap kegiatan ekspor
 - D. meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia
 - E. meningkatkan pembangunan ekonomi bagi Indonesia

6. Contoh kerja sama ekonomi multilateral adalah
 - A. Uni Eropa, NAFTA, dan AFTA
 - B. kerja sama antara Uni Eropa dengan ASEAN
 - C. pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Singapura
 - D. ASEAN, Uni Eropa, dan APEC
 - E. OPEC, WTO, dan IMF

7. Kerjasama Ekonomi Internasional Berikut ini yang merupakan merupakan faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional adalah
 - A. jumlah sumber daya alam yang berlimpah
 - B. adanya paksaan dari negara lain
 - C. perbedaan sumber daya, iklim, sosial, dan budaya
 - D. mempercepat pembangunan nasional
 - E. meningkatkan ekspor

8. Kerjasama internasional yang melibatkan beberapa negara tanpa memandang batas wilayah tertentu dan bersifat global adalah suatu bentuk kerjasama
- A. bilateral
 - B. multilateral
 - C. regional
 - D. antaregional
 - E. dualism
9. Salah satu tujuan didirikannya International Monetary Fund (IMF) adalah
- A. Membantu negara anggota yang kesulitan ekonomi
 - B. Mengurangi atau menghilangkan bea tarif yang menghambat perdagangan
 - C. Menghindarkan persaingan untuk membiayai program pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang
 - D. Memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang
 - E. Menciptakan ekonomi negara menjadi negara maju
10. Organisasi yang berusaha untuk mewujudkan perdagangan bebas dunia adalah
- A. IBRD
 - B. UNIDO
 - C. ILO
 - D. WTO
 - E. OPEC



EVALUASI BAB 3
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

1. Manfaat Kerja sama ekonomi antarnegara bagi Indonesia adalah
 - A. Promosi untuk menarik investor asing
 - B. Untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya
 - C. Untuk memperkenalkan produk-produk luar negeri
 - D. Untuk meningkatkan pemanfaatan ahli-ahli luar negeri
 - E. Menjual sumber daya alam di Indonesia

2. Suatu negara dikatakan melakukan kerja sama ekonomi internasional jika
 - A. Suatu negara menguasai perekonomian negara lain
 - B. Suatu negara menguasai perekonomian negara lain
 - C. Suatu negara melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain
 - D. Suatu negara mau menerima perbedaan-perbedaan di bidang ekonomi negara lain
 - E. memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain

3. Untuk membantu meringankan penderitaan negara-negara yang ditimpa bahaya kelaparan akibat perang dan bencana alam merupakan tugas dari ...
 - A. IMF
 - B. WTO
 - C. FAO
 - D. IBRD
 - E. ILO

4. Organisasi OPEC didirikan atas dasar
 - A. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - B. Persamaan kondisi geografis suatu negara
 - C. Persamaan sumber daya alam
 - D. Persamaan ideology
 - E. persamaan budaya

5. Agar Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri, maka Indonesia sebaiknya ...
 - A. Menambah berbagai jenis produk
 - B. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja
 - C. Menambah modal
 - D. Meningkatkan kualitas barang
 - E. menarik investor sebanyak-banyaknya

6. Tujuan dibentuknya OPEC adalah
 - A. Menjamin kembalinya modal investor pada bidang kehutanan
 - B. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah
 - C. Membantu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
 - D. Memberikan Gagasan Dalam Menghormati dan Melindungi HAM
 - E. menjaga tingkat harga dan pasokan minyak bumi dunia

7. Badan kerja sama ekonomi internasional yang diikuti oleh Indonesia, kecuali
 - A. PBB
 - B. ASEAN
 - C. KAA
 - D. UE
 - E. APEC

8. Salah satu tujuan didirikannya International Monetary Fund (IMF) adalah
 - A. Membantu negara anggota yang kesulitan ekonomi
 - B. Mengurangi atau menghilangkan bea tarif yang menghambat perdagangan
 - C. Menghindarkan persaingan untuk membiayai program pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang
 - D. Memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang
 - E. Menciptakan ekonomi negara menjadi negara maju

9. Berikut ini pernyataan yang benar tentang lembaga kerja sama Uni Eropa, yaitu
 - A. Uni Eropa merupakan organisasi kerja sama internasional yang terbatas pada bidang perdagangan
 - B. Uni Eropa merupakan lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE
 - C. Uni Eropa merupakan lembaga kerja sama regional di bidang ekonomi dan politik negara Eropa
 - D. Uni Eropa merupakan lembaga kerja sama internasional di bidang pangan dan politik
 - E. seluruh wilayah di Eropa masuk ke dalam kelompok Uni Eropa

10. Salah satu manfaat kerja sama internasional adalah... .
 - A. Meratakan hasil dalam negeri
 - B. Mencukupi kebutuhan dalam negeri
 - C. Menumbuhkan industri dalam negeri
 - D. Meningkatkan teknologi antarbangsa
 - E. Menambah produk luar negeri

11. Berikut ini bentuk-bentuk kegiatan ILO, kecuali
 - A. Memberikan pendidikan bagi para pekerja
 - B. Mengatur pertukaran tenaga kerja antarnegara
 - C. Menjalani kerja sama dengan pengusaha dan organisasi pekerja
 - D. Memperjuangkan standar yang lebih baik bagi pekerja
 - E. Memperkuat sistem perekrutan tenaga kerja

12. Berikut ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antarnegara, kecuali ...
 - A. Perdagangan antarnegara
 - B. Penyelenggaraan dan penerimaan jasa atau penanaman modal
 - C. Pinjam meminjam modal antarnegara
 - D. Menerima devisa berupa uang asing
 - E. Pertukaran tahanan antar negara

13. Berikut ini lembaga kerja sama antarnegara yang diikuti oleh Indonesia yaitu... .
- A. AU
 - B. CGI
 - C. APEC
 - D. EU
 - E. CAFTA
14. Contoh kerja sama Indonesia dengan Singapura di bidang ekonomi adalah...
- A. Tukar menukar pelajar
 - B. Kesepakatan dibentuknya kawasan wisata batam
 - C. Merealisasikan free trade arrangement
 - D. Pinjam meminjam teknologi
 - E. Kerjasama penyelamatan lingkungan
15. Tujuan pemerintah membatasi barang-barang impor adalah
- A. Meningkatkan konsumsi masyarakat
 - B. Menurunkan produksi dalam negeri
 - C. Menurunkan hasil produksi dalam negeri
 - D. Meningkatkan jumlah produksi dalam negeri
 - E. Meningkatkan devisa negara
16. Suatu hubungan kerja sama ekonomi dapat dihentikan apabila
- A. Semakin banyak pengangguran
 - B. Penerimaan devisa menurun
 - C. Kesepahaman semakin sulit dicapai
 - D. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat
 - E. Pertumbuhan ekonomi meningkat
17. Lembaga kerja sama APEC mempunyai tujuan bahwa wilayahnya dapat menjadi... .
- A. Pusat perdagangan internasional
 - B. Pusat penjualan produksi dalam negeri
 - C. Kawasan perdagangan bebas
 - D. Kawasan industri manufaktur
 - E. Pusat perdagangan batu bara
18. Salah satu dampak kerja sama ekonomi adalah meningkatkan produktivitas negara. Peningkatan produktivitas ini dapat mengurangi
- A. Pengangguran
 - B. Pendapatan negara
 - C. Devisa
 - D. Pinjaman
 - E. Investasi
19. Perhatikan kerja sama internasional di bawah ini !
- (i) Indonesia – Jepang
 - (ii) Indonesia – Vietnam
 - (iii) Vietnam – Amerika
 - (iv) Amerika – India
 - (v) Amerika – Indonesia
- Kerja sama ekonomi regional ditunjukkan oleh nomor....

- A. (I)
- B. (II)
- C. (III)
- D. (IV)
- E. (V)

20. Bacalah artikel dibawah!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kembali menjalin kerjasama dengan Southest Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (Seamolec). Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota School partnership Indonesia-Thailand. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, mengatakan program ini telah dimulai sejak dua tahun lalu dengan melibatkan 19 sekolah dari Indonesia dan 17 sekolah dari Thailand. Tahun ini, tercatat 27 SMK dari Indonesia yang diwakili 70 kepala sekolah/guru dan 33 college yang diwakili 60 guru/dosen dari Thailand ikut andil dalam kerjasama ini.
sumber : KOMPAS.com

Berdasarkan penggalan berita di atas, kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand termasuk bentuk kerja sama....

- A. Bilateral, Regional
- B. Multilateral, Regional
- C. Bilateral , nasional
- D. Multilateral, nasional
- E. internasional, multilateral

21. Bacalah artikel dibawah ini dengan seksama!

Seoul, (Analisa). Korea Selatan dan Indonesia akan mengadakan pembicaraan putaran pertama pada pekan ini yang akan membahas pakta perdagangan bebas, ujar pihak berwenang pada Rabu (11/7).Negosiator akan bertemu di Jakarta pada Kamis, untuk membahas ruang lingkup dan cakupan perjanjian, dan masalah-masalah lain, menurut kementerian perdagangan.Korsel sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan 10 anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mencakup Indonesia. "Kami ingin membuat perjanjian bilateral terpisah dengan Indonesia untuk memperluas volume perdagangan dan lingkup keterbukaan," kata seorang pejabat kementerian kepada AFP.

sumber : www.analisadaily.com

Berdasarkan penggalan berita di atas Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerjasama bidang

- A. Keuangan
- B. Produsen
- C. Pasar bebas
- D. Perdagangan
- E. Tarif

22. Bacalah artikel dibawah ini dengan seksama!
Mengawali kunjungan kerja di Sochi, Federasi Rusia, Presiden Joko Widodo, Rabu (18/5) sore waktu setempat, melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin serta memimpin pertemuan bilateral Indonesia-Rusia di Bucherov Rucey, rumah kediaman Presiden Putin di Sochi, Rusia. Dalam pertemuan bilateral, Presiden Jokowi menekankan pada dua bidang kerja sama, yakni kerja sama di bidang ekonomi serta pertahanan dan keamanan. "Indonesia dan Rusia adalah anggota G20 sehingga kedua negara berkepentingan untuk berkontribusi dalam pemulihan perekonomian global," kata Presiden seraya menungkapkan catatannya mengenai penurunan total nilai perdagangan bilateral, dari USD2,64 miliar di tahun 2014, menjadi USD1,98 miliar pada tahun 2015, atau turun sekitar 25%. Berdasarkan penggalan berita di atas bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Rusia adalah
- kerjasama Bilateral
 - kerjasama Multilateral
 - Kerjasama Regional
 - Kerjasama Antar regional
 - Kerjasama sub Regional
23. Badan kerja sama ekonomi ini merupakan bagian dari Bank Dunia yang bertugas mengalirkan dana perusahaan swasta untuk permodalan bukan pinjaman. Badan kerja sama yang dimaksud adalah...
- ASEAN
 - IDA
 - IFC
 - WTO
 - ILO
24. Salah satu tujuan pendirian *Asian Development Bank* adalah..
- Membantu negara anggota untuk melatih teknik kelautan
 - Saling membantu dibidang rekayasa perbankan
 - Mengatur sistem keuangan
 - Meningkatkan pengetahuan teknologi terapan dibidang makanan
 - Memberi bantuan teknik dan pinjaman pada negara yang sedang membangun
25. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan dari pendirian Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) adalah..
- Memenuhi kebutuhan minyak dunia
 - Menguasai harga minyak dunia
 - Menghindari persaingan antara sesama negara anggota
 - Menstabilkan harga minyak dunia
 - Menaikkan pendapatan tiap negara anggota
26. Lembaga ini merupakan lembaga pengganti GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan berdiri pada tahun 1947 dengan tujuan mengatur masalah tariff dan perdagangan dunia. Lembaga yang dimaksud ialah..
- OPEC
 - UNDP
 - ECOSOC
 - ILO
 - WTO

27. Berikut ini yang bukan merupakan dampak kerjasama ekonomi regional dan internasional secara umum adalah...
- A. terjalin persahabatan antarnegara anggota
 - B. kebutuhan negara negara anggota tercukupi
 - C. negara-negara didunia dapat saling membantu
 - D. meningkatkan daya saing antar negara
 - E. meningkatkan investasi
28. Untuk menolong dalam mengurangi penderitaan negara-negara yang ditimpa musibah kelaparan akibat perang dan bencana alam merupakan tugas dari
- A. IBRD
 - B. ASEAN
 - C. IMF
 - D. FAO
 - E. WTO
29. Organisasi yang berusaha untuk mewujudkan perdagangan bebas dunia adalah
- A. IBRD
 - B. UNIDO
 - C. ILO
 - D. WTO
 - E. OPEC
30. Persidangan para kepala negara ASEAN disebut
- A. *non-economic ministerial meeting*
 - B. *summit meeting*
 - C. *working group meeting*
 - D. *economic ministerial meeting*
 - E. *annual ministerial meeting*
31. Sekretariat ASEAN berkedudukan di
- A. Phnom Penh, Kamboja
 - B. Jakarta, Indonesia
 - C. Sarawak, Malaysia
 - D. Manila, Filipina
 - E. Vientiane, Laos
32. Organisasi atau badan kerja sama ekonomi antarnegara di bawah ini yang berbentuk regional adalah
- A. IFC
 - B. UNCTAD
 - C. OPEC
 - D. WTO
 - E. APEC

33. Organisasi atau badan kerja sama ekonomi internasional di bawah naungan PBB adalah...
- A. NAFTA
 - B. AFTA
 - C. UNDP
 - D. CGI
 - E. OPEC
34. Salah satu tujuan AFTA, yaitu
- A. memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan
 - B. meningkatkan daya saing ASEAN di bidang ekonomi
 - C. menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di ASEAN
 - D. meningkatkan kepariwisataan di negara ASEAN
 - E. memperluas kerja sama di bidang politik dan militer
35. Perbedaan kerja sama bilateral dengan kerja sama multilateral adalah
- A. kerja sama bilateral berlaku pada bidang ekonomi saja, sedangkan kerjasama multilateral, yaitu pada bidang yang tidak terbatas
 - B. kerja sama bilateral terbatas pada bidang tertentu, sedangkan kerja sama multilateral mencakup berbagai bidang
 - C. kerja sama bilateral terbatas pada kawasan tertentu, sedangkan kerja sama multilateral mencakup kawasan yang tidak terbatas
 - D. kerja sama bilateral berlaku pada jangka waktu tertentu, sedangkan kerja sama multilateral untuk jangka waktu yang tidak terbatas
 - E. kerja sama bilateral terbatas pada dua negara, sedangkan multilateral terjadi dengan banyak negara



BAB 4. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KEGIATAN BELAJAR I

KONSEP PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1.1 KD DAN IPK

- 3.9 Menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional.
 - 3.9.1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional
 - 3.9.2. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional
 - 3.9.3. Menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional
 - 3.9.4. Menjelaskan teori perdagangan internasional

- 4.9 Menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional.
 - 4.9.1 Menyajikan hasil analisis tentang dampak kebijakan perdagangan internasional melalui media lisan dan tulisan

1.2 MATERI

A. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan atau pemerintah.

B. Manfaat Perdagangan Internasional

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri
2. Memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi
Dengan adanya perdagangan internasional maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah sehingga akan meningkatkan skala ekonomis sehingga biaya produksi semakin murah
3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Walaupun A negara dapat memproduksi barang X yang juga diproduksi di negara B, negara A dapat melakukan spesialisasi pada barang lain yang lebih efisien diproduksi dan mengimpor barang X dari negara B.
4. Sebagai sumber devisa Negara
Adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

5. Mendorong alih teknologi
 Dengan melakukan perdagangan dengan negara maju, negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan, sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang.

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Perdagangan Internasional

1. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

- 1) Perbedaan Sumber Daya Alam.
- 2) Perbedaan Sumber Daya Manusia
- 3) Selera.
- 4) Penghematan Biaya Produksi (Efisiensi).
- 5) Perbedaan Tekonologi.

2. Faktor Penghambat Perdagangan Internasional

- 1) Tidak Amannya Suatu Negara.
- 2) Kebijakan Ekonomi Internasional oleh Pemerintah.
- 3) Tidak Stablnya Kurs Mata Uang Asing.

D. Teori Perdagangan Internasional

1. Teori dari Kaum Merkantilis

Inti pokok aliran Merkantilisme adalah menginginkan peranan Pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus memupuk cadangan logam mulia. Jadi sumber kemakmuran terletak pada banyaknya persediaan logam mulia serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor
 Kebijakan yang diambil untuk mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong meningkatkan ekspor
- b. Membatasi impor
- c. Memperluas daerah koloni/jajahan guna mendapatkan logam mulia atau
- d. bahan mentah yang murah
- e. Memperoleh monopoli dalam perdagangan

2. Teori klasik dikemukakan oleh *Adam Smith* dan *David Ricardo*:

a. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*)

Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain.

Perhatikan contoh produksi negara Indonesia dan China dibawah ini!

Negara	TV (buah)	Kayu (meter kubik)
China	40	20
Indonesia	30	60

Pekerja di china mampu membuat TV lebih banyak daripada di Indonesia. China mampu membuat 40 TV sedangkan Indonesia hanya mampu membuat 30 TV, Sedangkan pekerja Indonesia mampu menghasilkan kayu lebih banyak daripada

China. Indonesia mampu menghasilkan 60 meter kubik kayu sedangkan China hanya mampu menghasilkan 20 meter kubik kayu.

Sehingga berdasarkan tabel diatas, perdagangan yang terjadi adalah China mengimpor kayu dari Indonesia sedangkan Indonesia mengimpor TV dari china. Sehingga keduanya akan menciptakan hubungan dagang yang saling menguntungkan

b. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)

Teori keunggulan komparatif melihat kelemahan dalam keunggulan absolut jika satu negara memiliki seluruh keunggulan yang dimiliki pada semua jenis komoditas, maka agar tetap terjadi perdagangan internasional, dicetuskan teori keunggulan komparatif.

Perhatikan contoh berikut ini!

Negara	TV (buah)	Kayu (meter kubik)
China	10	8
Indonesia	12	24

Pada tabel diatas, Indonesia memiliki keunggulan pada produksi kayu maupun TV dari pada China,

Namun Indonesia memiliki keunggulan komparati dalam produksi Kayu. Sedangkan China walaupun kalah denga Indonesia dalam produksi keduanya, namun China memiliki kelemahan terkecil dalam produksi TV.

Sehingga perdagangan yang terjadi adalah Indonesia mengeskor Kayu dan mengimpor TV, sedangkan China mengeskor TV dan mengimpor kayu dari Indonesia.

Bagaimanapun kedua negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

di Indonesia 1 kubik kayu = 0,5 TV.

di China 1 kubik kayu = 1,25 TV.

Jika kedua negara itu berdagang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan = 0,75 TV

di China 1 TV = 0,8 kubik kayu.

di Indonesia 1 TV = 2 kubik kayu.

Jika kedua negara berdagang, maka China akan mendapatkan keuntungan 1,2 kubik kayu

Berdasarkan analisis diatas, maka perdagangan yang terjadi adalah Indonesia mengeskor Kayu dan mengimpor TV dari China, sedangkan China mengeskor TV dan mengimpor kayu dari Indonesia.

1.3 LATIHAN SOAL

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Jelaskan pengertian perdagangan ekonomi internasional!
2. Jelaskan manfaat perdagangan internasional!
3. Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa antar Negara (bisa dua Negara atau lebih) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat suatu Negara. Sebutkan lima (5) faktor pendorong dan lima (5) faktor penghambat perdagangan internasional!
4. Jelaskan perbedaan teori klasik dikemukakan oleh *Adam Smith* dan *David Ricardo*!
5. Berikut ini merupakan produksi dua macam komoditi yang dihasilkan dua buah Negara, masing-masing oleh seorang tenaga kerja dalam satu hari (8 jam kerja)

NO	NEGARA	BERAS	BERAS
1	Indonesia	1.120 kg	432 kg
2	Vietnam	1.175 kg	234 kg

- a. Sebutkan spesialisasi yang tepat untuk Indonesia dan Vietnam dalam perdagangan Internasional !
- b. Hitung keuntungan mutlak yang terjadi setelah spesialisasi perdagangan internasional dilakukan oleh kedua Negara !

1.4 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Suatu Negara akan memperoleh keuntungan mutlak apabila Negara tersebut dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih murah dibandingkan Negara lain. Ini merupakan pendapat dari
 - A. David Ricardo
 - B. J. Schumpeter
 - C. Alfred Marshall
 - D. Adam Smith
 - E. J.S Mill
2. Alasan pemerintah melakukan pelarangan impor untuk barang-barang tertentu adalah
 - A. menghemat devisa yang dimiliki negara
 - B. tidak banyak masyarakat yang membutuhkannya
 - C. barang tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat
 - D. melindungi industri dalam negeri
 - E. membalas tindakan negara lain yang melakukan pelarangan impor

3. Tabel hasil perdagangan negara "Alfa", negara "Beta" dan negara "Delta" tahun 2019

Kegiatan	Negara Alfa	Negara Beta	Negara Delta
Ekspor	\$ 60.000	\$120.000	\$ 200.000
Impor	\$ 120.000	\$ 80.000	\$ 280.000

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa

- A. negara "Alfa" mengalami surplus sebesar US\$ 60.000,00
 - B. negara "Beta" mengalami surplus sebesar US\$ 60.000,00
 - C. negara "Delta" mengalami defisit sebesar US\$ 50.000,00
 - D. negara "Alfa" mengalami defisit lebih besar dari Negara "Delta"
 - E. negara "Alfa" mengalami defisit lebih kecil dari Negara "Delta"
4. Berikut adalah faktor pendukung perdagangan internasional...
 - A. perbedaan sumber daya alam
 - B. perbedaan mata uang negara
 - C. kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah
 - D. adanya kebijakan impor
 - E. faktor keamanan negara
 5. Yang bukan manfaat perdagangan internasional
 - A. memenuhi kebutuhan dalam negeri
 - B. meningkatkan IPTEK
 - C. menambah pengangguran
 - D. menjalin kerjasama antar negara
 - E. menambah sumber pendapatan negara

6. Pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan adalah
 - A. Perdagangan luar negeri
 - B. Perdagangan dalam negeri
 - C. Perdagangan nasional
 - D. Perdagangan Internasional
 - E. Perdagangan lokal

7. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Teori ini dikemukakan oleh ...
 - A. David Ricardo
 - B. David Jones
 - C. Adam Smith
 - D. Adam Jordan
 - E. Karl Marx

8. Faktor penghambat perdagangan internasional
 - A. perbedaan sumber daya alam
 - B. perbedaan selera
 - C. penghematan biaya produksi
 - D. kebijakan pemerintah dalam negeri
 - E. tingkat teknologi

9. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh
 - A. Adam Smith
 - B. David Ricardo
 - C. Karl Mark
 - D. Heckscher-Ohlin
 - E. Harod Domar

10. Keuntungan yang terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan, dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain
 - A. keunggulan mutlak
 - B. keunggulan komparatif
 - C. Keunggulan absolut komparatif
 - D. Keunggulan perdagangan
 - E. Keunggulan eksporti

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1.5 KD DAN IPK

- 3.9 Menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional.
 - 3.9.5. Menjelaskan kebijakan perdagangan internasional
 - 3.9.6. Menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional
 - 3.9.7. Menjelaskan alat pembayaran internasional
 - 3.9.8. Menjelaskan neraca pembayaran internasional
 - 3.9.9. Menjelaskan pengertian devisa
- 4.9 Menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional.
 - 4.9.1 Menyajikan hasil analisis tentang dampak kebijakan perdagangan internasional melalui media lisan dan tulisan

1.6 MATERI

A. Kebijakan Perdagangan Internasioal

1. Kuota
Kuota merupakan salah satu cara melakukan proteksi yang sifatnya nontarif. Kuota adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor.
2. Penetapan Tarif atau Bea Masuk
Tarif atau bea masuk dikenakan pada barang impor. Tarif atau bea masuk ini juga biasa disebut dengan pajak atas barang-barang impor. Setiap barang yang masuk ke dalam pasar dalam negeri dikenai bea masuk.
3. Subsidi
Apa alasan pemerintah memberikan subsidi dalam perdagangan internasional? Agar produksi di dalam negeri dapat ditingkatkan maka pemerintah memberikan subsidi kepada produsen. Misalnya, di pasar dalam negeri terdapat produk elektronik buatan dalam negeri dan buatan luar negeri (impor). Kedua jenis barang tersebut mempunyai kualitas yang sama baiknya. Maka, produsen diberikan subsidi agar dapat menjual produknya dengan harga murah sehingga daya saing produk dalam negeri meningkat. Subsidi yang diberikan dapat berupa mesin-mesin, peralatan, tenaga ahli, keringanan pajak, fasilitas kredit, dan sebagainya.
4. Larangan Ekspor/Impor
Mengapa kegiatan ekspor/impor dilarang? Jika demikian, bukankah hal ini berarti meniadakan perdagangan internasional? Dalam perdagangan internasional dikenal prinsip-prinsip perdagangan bebas. Artinya, perdagangan yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan proteksi ekspor/ impor justru akan merugikan kedua belah pihak (negara eksportir dan importir).
5. Diskriminasi Harga
Diskriminasi harga adalah kebijakan perdagangan internasional dengan cara penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama.

6. Premi

Premi adalah “bonus” yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

7. Politik Dumping

Dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional (international price discrimination) yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dibayar konsumen di dalam negeri.

8. Politik Dagang Bebas (Free Trade)

Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara.

9. Larangan Ekspor/Impor

Mengapa kegiatan ekspor/impor dilarang? Jika demikian, bukankah hal ini berarti meniadakan perdagangan internasional? Dalam perdagangan internasional dikenal prinsip-prinsip perdagangan bebas. Artinya, perdagangan yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan proteksi ekspor/ impor justru akan merugikan kedua belah pihak (negara eksportir dan importir).

Proteksi yang biasa dilakukan, yaitu dengan pemberlakuan larangan ekspor/impor produk/jasa tertentu. Misalnya, di Indonesia pernah terdapat larangan ekspor rotan yang berasal dari hutan alam dalam bentuk asal atau setengah jadi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk jadi rotan asal Indonesia di pasar internasional dan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku rotan untuk industri. Di bidang impor, misalnya larangan impor gula, beras, dan tekstil. Larangan ini bertujuan untuk melindungi produsen di dalam negeri.

B. Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional

Setiap mengambil kebijakan perdagangan internasional, tentunya sebuah negara ingin memiliki tujuan yang baik bagi kepentingan nasionalnya, beberapa tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. menaikkan cadangan devisa suatu negara
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3. memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi sendiri
4. menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri
5. memperluas pasar barang dan jasa
6. meningkatkan lapangan kerja
7. melakukan transfer teknologi

C. Alat pembayaran Internasional

Dalam kegiatan perdagangan internasional pembayaran dilakukan dengan berbagai macam cara yang telah disepakati antara pengekspor dengan pengimpor maupun sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam transaksi perdagangan internasional, Berikut ini adalah beberapa alat pembayaran internasional;

1. Pembayaran Tunai Atau Cash Payment

pembayaran dengan cara ini lakukan dengan berbagai cara yaitu dengan uang tunai , cek , dress atau wesel atas unjuk dan transfer

2. Rekening Terbuka

Pada cara pembayaran ini, yang mengirimkan barang kepada importir menyertakan juga surat tagihan dan dokumen-dokumen terhadap barang yang dikirimkan, dan importir membayar kepada eksportir setelah barang telah diterima oleh importir.

3. Surat Wesel Dagang

Perintah pembayaran yang dibuat oleh eksportir berisi sejumlah harga barang yang harus dibayarkan oleh importir kepada pihak tertentu yang sudah ditunjuk oleh kedua belah pihak.

4. Letter Of Credit

adalah Surat yang dikeluarkan Bank atas permintaan importir yang telah menyetujuinya dan akan membayar wesel yang ditarik eksportir atas importir.

- a) L/C Biasa, dimana importir langsung membayar sesuai harga barang yang akan diimpor kepada eksportir di luar negeri melalui bank tertentu.
- b) Merchant L/C, dimana importir dapat menerima barang terlebih dahulu, pembayaran sebagian dilakukan saat membuka L/C, kekurangannya dibayar kemudian.
- c) Red Clause L/C, adalah L/C yang mencantumkan perintah kepada bank untuk melaksanakan pembayaran sebagian dari jumlah L/C kepada eksportir sebelum mengirimkan barangnya.
- d) Industrial L/C, digunakan untuk mengimpor barang industri secara cepat demi peningkatan industri dalam negeri.
- e) Usance L/C artinya L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen

D. Devisa

Devisa adalah sejumlah valuta asing yang berguna untuk membiayai transaksi perdagangan antarnegara atau internasional.

Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia antara lain : US Dollar (\$), Euro, Switzerland-Franc, DM (Deutsche Mark)- Germany, Dollar-Canada, Poundsterling (Inggris), Yen Jepang, Prancis-Franc, emas, dan surat berharga yang berlaku guna pembayaran internasional. .

Pemerintah maupun swasta wajib untuk mempunyai cadangan devisa guna perdagangan internasional antarnegara dalam menjaga stabilitas moneter serta ekonomi makro sebuah negara. Cadangan devisa adalah salah satu indikator moneter kuat atau lemahnya ekonomi negara tersebut. Pengertian cadangan devisa adalah sejumlah valas yang dicadangkan oleh Bank Sentral guna kebutuhan pembiayaan serta kewajiban luar negeri.

Devisa dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil suatu negara mengekspor barang ataupun jasa berita dalam negeri.

Contoh dari pada devisa umum adalah ekspor pada jasa bantuan luar negeri udah dari luar negeri bisa kredit devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman dari luar negeri tingkat kurs dalam devisa kredit biasanya ditentukan suatu negara bukan atas permintaan dan penawaran di dalam pasar

Contoh devisa kredit adalah utang luar negeri , penerimaan bunga dan deviden dari luar negeri penerimaan emas dari luar negeri serta investasi dari luar negeri

Kurs Valuta Asing

kurs valuta asing adalah perbandingan uang suatu negara dengan negara yang lain, contoh 1 USD sama dengan Rp.10.000,00

macam-macam kurs

- kurs jual adalah harga valuta asing saat bank menjualnya, digunakan saat uang dalam negeri ditukarkan dengan mata uang asing
- kurs beli adalah harga valuta asing saat bank membelinya, digunakan saat valuta asing ditukarkan ke mata uang dalam negeri

contoh kurs

kurs jual 1 US Dollar = Rp.10.000,00

kurs beli 1 US dolar = Rp.9.000,00

contoh Kurs Jual

Adam ingin pergi ke Amerika Serikat dengan membawa uang 10 juta rupiah, kemudian uang tersebut ditukarkan di bank untuk dikonversikan menjadi mata uang Dolar Amerika Serikat, berdasarkan kurs di atas, berapakah uang dolar yang akan didapatkan oleh Adam?

karena adam akan membeli dolar, transaksi dilakukan menggunakan kurs jual, karena bank akan menjual valuta asing kepada Adam. maka uang Dolar yang akan Adam dapatkan adalah sebesar $\text{Rp.10.000.000} : \text{Rp.10.000} = 1.000 \text{ USD}$

Contoh Kurs Beli

Adam kembali dari Amerika Serikat, masih menyisihkan uang sebesar 200 USD, uang tersebut akan ia tukarkan menjadi mata uang rupiah di bank. maka berapakah uang yang akan anda dapatkan setelah tukarkan ke dalam mata uang rupiah?

karena pihak bank akan membeli dolar maka transaksi yang akan dilakukan kan menggunakan kurs beli, sehingga uang yang akan didapatkan Adam adalah sebesar $200 \text{ USD} \times \text{Rp.9000} = \text{Rp.1.800.000}$

A. Neraca Pembayaran

1. Pengertian Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran internasional (*Balance of Payment*) merupakan catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah.

Transaksi ekonomi internasional yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional dapat digolongkan menjadi dua yaitu transaksi debit dan kredit.

Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit.

- Transaksi debit**, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.

Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (-).

- b. **Transaksi kredit**, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.

Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).

2. Komponen Neraca Pembayaran

a. Transaksi Berjalan

Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian data yang ditunjukkan menggambarkan nilai barang transaksi berjalan dicatat transaksi-transaksi berikut ini.

Ekspor dan impor barang.

Ekspor dan impor jasa (misalnya: transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan luar negeri, dan pendapatan dari investasi modal). Perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor barang-barang disebut neraca perdagangan. Suatu negara dikatakan mempunyai surplus jika dalam neraca perdagangan nilai ekspor melebihi nilai impor.

b. Arus Modal

Transaksi modal menggambarkan aliran keluar masuk modal di antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam arus modal, dicatat dua golongan transaksi, yaitu:

Aliran modal pemerintah. Aliran ini dapat berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah.

Aliran modal swasta. Aliran modal swasta, terdiri atas investasi langsung, investasi portofolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan. Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain.

3. Fungsi Neraca Pembayaran

- Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat, mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya.
- Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara.
- Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.

- d. Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri.
- e. Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu.
- f. Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.

1.7 LATIHAN SOAL

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Jelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional!
2. Apa yang dimaksud dengan kebijakan dumping dalam perdagangan Internasional?
3. Jelaskan alat pembayaran perdagangan internasional!
4. Perhatikan data Neraca Pembayaran Internasional Negara Matahari sebagai berikut:

Komponen	Rp (dalam Triliun)
Ekspor	300
Impor	500
Neraca Perdagangan	-200
Pinjaman otonom	+125
Pinjaman akomodatif	+25
Stok nasional	+50
Saldo	0

Tentukan kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran Negara Matahari tersebut!

5. Jelaskan pengertian Devisa!

1.8 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN

Kerjakan soal berikut dengan benar!

1. Sumber utama penambahan devisa negara berasal dari ...
 - A. Ekspor
 - B. Impor
 - C. utang luar negeri
 - D. neraca perdagangan
 - E. impor jasa
2. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, kecuali ...
 - A. citarasa masyarakat
 - B. inflasi
 - C. tingkat suku bunga
 - D. harga barang ekspor
 - E. investasi
3. AS mengekspor kendaraan ke Indonesia. Dilihat dari negara Indonesia, transaksi tersebut dimasukkan dalam transaksi ...
 - A. kredit neraca modal
 - B. debit neraca modal
 - C. kredit neraca emas
 - D. debit neraca barang dan jasa
 - E. netral
4. Jika saldo neraca pembayaran surplus, maka permintaan terhadap valas berkurang sehingga mengakibatkan terhadap rupiah ...
 - A. Terapresiasi
 - B. Terdepresiasi
 - C. terdevaluasi.
 - D. Terevaluasi
 - E. terinflasi
5. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut ...
 - A. foreign exchange
 - B. hard currency
 - C. soft currency
 - D. current account
 - E. agent account
6. Tokoh yang mengeluarkan buku *The Wealth of Nation* adalah ...
 - A. Adam Smith
 - B. JM Keynes
 - C. GR Terry
 - D. David Ricardo
 - E. Karl Bucher

7. Perdagangan bebas merupakan pilihan untuk memajukan perdagangan internasional. Untuk menghindari terjadinya sengketa dalam perdagangan, maka terbentuklah lembaga yang mengatur serta mengawasinya yang disebut ...
- A. WTO
 - B. AFTA
 - C. GATT
 - D. APEC
 - E. ITO
8. Alasan mendasar suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional yaitu ...
- A. tidak mampu memproduksi sendiri
 - B. meningkatkan pendapatan negara
 - C. memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan
 - D. harga barang dari luar negeri lebih murah
 - E. kelebihan produksi dan memperluas pasar
9. Berikut ini merupakan transaksi yang dicatat disisi debet pada neraca pembayaran, kecuali...
- A. transaksi pemasukan emas dari luar negeri
 - B. membayar jasa pihak luar negeri
 - C. impor barang
 - D. membayar jasa dan cicilan utang
 - E. ekspor barang
10. Membayar jasa dan cicilan utang ke luar negeri akan mempengaruhi neraca pembayaran sebelah ...
- A. debet
 - B. defisit
 - C. positif
 - D. negatif
 - E. kredit



EVALUASI BAB 4

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Berikut adalah faktor pendukung perdagangan internasional...
 - A. perbedaan sumber daya alam
 - B. perbedaan mata uang negara
 - C. kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah
 - D. adanya kebijakan impor
 - E. faktor keamanan negara

2. Yang bukan manfaat perdagangan internasional
 - A. memenuhi kebutuhan dalam negeri
 - B. meningkatkan IPTEK
 - C. menambah pengangguran
 - D. menjalin kerjasama antar negara
 - E. menambah sumber pendapatan negara

3. Pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan adalah
 - A. Perdagangan luar negeri
 - B. Perdagangan dalam negeri
 - C. Perdagangan nasional
 - D. Perdagangan Internasional
 - E. Perdagangan lokal

4. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Teori ini dikemukakan oleh ...
 - A. David Ricardo
 - B. David Jones
 - C. Adam Smith
 - D. Adam Jordan
 - E. Karl Marx

5. Faktor penghambat perdagangan internasional
 - A. perbedaan sumber daya alam
 - B. perbedaan selera
 - C. penghematan biaya produksi
 - D. kebijakan pemerintah dalam negeri
 - E. tingkat teknologi

6. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh
 - A. Adam Smith
 - B. David Ricardo
 - C. Karl Mark
 - D. Heckscher-Ohlin
 - E. Harod Domar

7. keuntungan yang terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan, dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain
- keunggulan mutlak
 - keunggulan komparatif
 - Keunggulan absolut komparatif
 - Keunggulan perdagangan
 - Keunggulan eksporti

8. Perhatikan tabel dibawah ini untuk nomer 8

Negara	TV (buah)	Kayu (meter kubik)
Yunani	40	20
Mesir	30	60

Keunggulan yang terjadi adalah...

- keunggulan mutlak
 - keunggulan komparatif
 - Keunggulan absolut komparatif
 - keunggulan perdagangan
 - keunggulan eksportir
9. Pernyataan yang BUKAN merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan internasional adalah ...
- Pak Harto senang mengenakan produk otomotif asal Jepang
 - Indonesia rutin mengirimkan tenaga kerja ke beberapa negara ASEAN
 - Pak Rudi warga negara Indonesia, menjual barang kepada rekannya berkebangsaan Australia tinggal di Semarang
 - Saat bulan puasa impor kurma dari Arab Saudi menongkat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
 - Taiwan menjual produk pakan pertanian ke Thailand
10. Negara X memutuskan membeli produk otomotif dari negara Y karena butuh biaya lebih besar bila harus memproduksi produk otomotif sendiri. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu....
- Perbedaan teknologi
 - Perbedaan sumber daya manusia
 - Perbedaan sumber daya alam
 - Perbedaan selera
 - Efisiensi
11. Berikut ini adalah contoh terciptanya peralihan teknologi akibat perdagangan internasional...
- Pemberian pelatihan terhadap teknisi mobil hemat energi diimpor Jepang
 - Diberlakukannya impor beras guna memenuhi kebutuhan dalam negeri
 - Ekspor produk pertanian ke negara yang mengalami kekurangan produk pertanian
 - Produk otomotif buatan Jepang sangat diminati di Indonesia karena Jepang mampu menghasilkan produk otomotif berkualitas baik dengan biaya relatif murah

- E. Kurma banyak dibeli negara-negara tetangga karena kurma dapat tumbuh subur di Arab Saudi
12. Faktor yang tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah
- A. perbedaan sumber daya alam
 - B. munculnya perbedaan budaya
 - C. perbedaan kepercayaan
 - D. perbedaan kualitas sumber daya manusia
 - E. perbedaan selera
13. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah
- A. kebebasan berdagang
 - B. mencari keuntungan yang maksimal
 - C. ahli teknologi canggih
 - D. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - E. kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya
14. Politik atau kebijakan yang dilakukan dengan cara menjual produk ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri disebut
- A. Tariff
 - B. kuota
 - C. subsidi
 - D. dumping
 - E. premi
15. Letter of Credit adalah
- A. pembayaran tunai
 - B. pembayaran setelah barang dikirim
 - C. pembayaran melalui wesel
 - D. pembayaran secara kredit
 - E. pembayaran kontan
16. Berikut ini yang termasuk lembaga/tempat untuk menukar valuta asing adalah
- A. bursa efek
 - B. pasar uang
 - C. money changer
 - D. pasar modal
 - E. pasar modern
17. Jika di dalam neraca pembayaran, jumlah transaksi debit lebih besar dari transaksi kredit disebut neraca pembayaran
- A. Surplus
 - B. Defisit
 - C. Seimbang
 - D. Ekspor
 - E. stabil

18. Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antarnegara disebut ...
- A. ekonomi internasional
 - B. neraca pembayaran
 - C. perdagangan internasional
 - D. ekspor-impor
 - E. ekonomi pembangunan
19. Bagian dari aktivitas ekonomi internasional yang menyangkut pertukaran barang dan jasa antarpelaku ekonomi lintas negara disebut ...
- A. ekonomi internasional
 - B. neraca pembayaran
 - C. perdagangan internasional
 - D. ekspor-impor
 - E. ekonomi pembangunan
20. Yang bukan manfaat perdagangan internasional ...
- A. menjaga stabilitas harga dalam negeri
 - B. mempercepat teknologi
 - C. mengurangi cadangan devisa
 - D. memperluas lapangan kerja
 - E. menambah cadangan devisa
21. Yang bukan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah ...
- A. sumber daya alam
 - B. teknologi
 - C. kualitas sumber daya manusia
 - D. sistem ekonomi
 - E. jumlah penduduk
22. Perdagangan yang dilakukan oleh 2 negara untuk saling memenuhi kebutuhannya disebut...
- A. perdagangan bilateral
 - B. perdagangan regional
 - C. perdagangan multilateral
 - D. perdagangan internasional
 - E. perdagangan duoterat
23. Yang bukan tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional ...
- A. melindungi produksi dalam negeri
 - B. mendorong laju pertumbuhan ekonomi
 - C. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - D. menyehatkan neraca pembayaran
 - E. transfer teknologi

24. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing disebut ...
- Devaluasi
 - Revaluasi
 - Apresiasi
 - Depresiasi
 - deflasi
25. Catatan sistematis transaksi ekonomi internasional antar penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu disebut ...
- neraca barang
 - neraca pembayaran
 - neraca internasional
 - neraca perdagangan
 - neraca saldo
26. Badan kerjasama ekonomi internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dagang negara-negara anggota disebut ...
- AFTA
 - OPEC
 - APEC
 - WTC
 - WTO
27. Kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menurunkan biaya produksi dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri disebut ...
- Subsidi
 - Dumping
 - Kuota
 - Tariff
 - larangan impor
28. Berikut pos-pos neraca pembayaran:
- 1) pelayanan jasa penerbangan bagi warga negara asing
 - 2) pengiriman TKW ke luar negeri
 - 3) penjualan kayu lapis
 - 4) pembayaran bunga utang luar negeri
 - 5) pembelian mesin perusahaan dari luar negeri
- Yang termasuk ke dalam neraca jasa adalah ...
- 1, 2 dan 3
 - 1, 3 dan 4
 - 1, 2 dan 4
 - 1, 3 dan 5
 - 2, 3 dan 4

29. Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi dari ...
- A. kebijakan proteksi dan kebijakan impor
 - B. kebijakan perdagangan dan investasi
 - C. kebijakan pengembangan ekspor dan kebijakan impor
 - D. kebijakan investasi dan nilai tukar
 - E. kebijakan nilai tukar dan devisa
30. Pemasukan devisa melalui jalur wisata dicatat dalam neraca pembayaran pada ...
- A. neraca lalu lintas moneter sisi debit
 - B. neraca lalu lintas moneter sisi kredit
 - C. neraca jasa sisi kredit
 - D. neraca jasa sisi debit
 - E. neraca lalu lintas modal sisi debit



PENUTUP

Melalui pembelajaran berbasis modul ini, diharapkan akan membantu siswa dapat belajar secara mandiri, mengukur kemampuan diri sendiri, dan menilai dirinya sendiri. Tidak terkecuali dalam memahami ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi secara global. Semoga modul ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam proses pembelajaran pada kegiatan belajar siswa, baik teori maupun praktik dan tatap muka maupun online. Siswa diharapkan mendalami materi lain di samping materi yang ada di modul ini melalui berbagai sumber, jurnal, maupun internet. Semoga modul ini bermanfaat bagi para siswa kelas XI.

Tak lupa dalam kesempatan ini, penulis mohon saran dan kritik yang membangun terhadap, demi sempurnanya penyusunan modul ini di masa-masa yang akan datang. Semoga modul ini memberikan manfaat bagi siswa, guru dan bagi institusi pendidikan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta



DAFTAR PUSTAKA

Nurmawan. 2020. Modul Ekonomi Perpajakan. Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Yanti Herlinawati. 2020. Modul Ekonomi Perpajakan. Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Alam & Rudiyanto. 2016. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013 yang Disempurnakan Kelompok Peminatan. Jakarta: Erlangga

Firmansyah, Herlan dan Diana Nurdiansyah. 2016. Buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Ekonomi 2. Bandung: Frafindo Media Pratama





SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

**Jl. Gotong Royong II Petinggen, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 55241
Telp. (0274) 563739, Fax. (0274) 519533**

**Email : info@smumuhi-yog.sch.id | Homepage : www.smumuhi-yog.sch.id
Instagram : [@smamuhi.jogja](https://www.instagram.com/smamuhi.jogja) | Facebook : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
Youtube : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta**